



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang memuat data dan informasi yang akan digunakan oleh kepala daerah sebagai bahan untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan sebagai alat deteksi dini permasalahan dalam melaksanakan kebijakan. keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pangkalpinang, 30 Maret 2021
GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN



DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-3
	a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	I-3
	b. Data Geografis Wilayah.....	I-3
	c. Jumlah Penduduk.....	I-5
	d. Jumlah Kabupaten/Kota (Untuk Provinsi).....	I-5
	e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah... ..	I-6
	f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	I-7
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-7
	a. Permasalahan strategis pemerintah daerah.....	I-7
	b. Visi dan misi kepala daerah.....	I-8
	c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan.....	I-8
	d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.....	I-12
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I-65
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
	2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-2
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-2
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-60
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-69
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II-73
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
	1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan.....	III-1
	2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi.....	III-1
	3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.....	III-1
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi.....	III-2
	3.1.1 Target Kinerja.....	III-2
	3.1.2 Realisasi.....	III-3

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III-42
3.2.1 Target Kinerja.....	III-42
3.2.2 Realisasi.....	III-42
3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III-46
3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	III-46
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1 Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	IV-1
4.1.3 Realisasi.....	IV-1
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	IV-2
4.1.5 Dukungan Personil.....	IV-2
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-2
4.2 Urusan Kesehatan.....	IV-3
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-6
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-8
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-10
4.6 Urusan Sosial.....	IV-13
4.7 Program dan Kegiatan.....	IV-18
BAB V	
PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. undang-undang pembentukan daerah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang ke 32 (tiga puluh dua), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awal terbentuknya provinsi, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

b. data geografis wilayah;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau

Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, *land management* dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh *geological formation*, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

1) Batas Wilayah

Berdasarkan batas wilayahnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Selat Karimata di sebelah Timur;
- Laut Jawa di sebelah Selatan;
- Selat Bangka di sebelah Barat; dan
- Laut Natuna di sebelah Utara.

2) Luas Wilayah

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- Kabupaten Bangka luas wilayah : 2.950,68 km²
- Kabupaten Bangka Barat luas wilayah : 2.820,61 km²
- Kabupaten Bangka Tengah luas wilayah : 2.155,77 km²
- Kabupaten Bangka Selatan luas wilayah : 3.607,08 km²
- Kabupaten Belitung luas wilayah : 2.293,61 km²
- Kabupaten Belitung Timur luas wilayah : 2.506,91 km²
- Kota Pangkalpinang luas wilayah : 89,40 km²

Berdasarkan wilayah administrasi, pemerintah kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 sebagai berikut:

- Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan, 19 kelurahan dan 62 desa;
- Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa;
- Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan, 7 kelurahan dan 56 desa;
- Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa;
- Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa;
- Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa;
- Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.

3) Topografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan Hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

4) Geologi

Kondisi geologi di *wilayah* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup potensial untuk kawasan pengembangan. Hampir diseluruh wilayah. Material timah (tin), Kaolin, Kuarsa (quartz) dan bilitonite (dikenal

dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

5) Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter.

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai antara lain: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Kotawaringin, Sungai Ajang Mabat dan Sungai Kurau di Pulau Bangka, sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

6) Klimatologi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Curah hujan berkisar antara 67,9 mm sampai dengan 409 mm atau curah hujan rata-rata per tahun 238,45 mm. Pada bulan Agustus dan September suhu udara berkisar antara 23,5 °C sampai dengan 32,1 °C dengan kelembaban udara terendah 72–73%. Kelembaban udara tertinggi mencapai 89% dan umumnya terjadi pada bulan Desember.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mencapai 1.517.590 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93 dan rasio jenis kelamin 108,49. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 108,49 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016–2020

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	317.735	324.305	330.793	337.337	343.821
Belitung	178.721	182.418	186.155	189.824	193.493
Bangka Barat	200.684	204.778	209.011	213.163	217.332
Bangka Tengah	184.720	188.603	192.429	196.196	200.016
Bangka Selatan	197.670	201.782	205.901	209.973	213.966
Belitung Timur	121.971	124.587	127.064	129.572	132.069
Pangkalpinang	200.326	204.392	208.520	212.727	216.893
Kepulauan Bangka Belitung	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792	1.517.590

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

d. Jumlah Kabupaten/Kota;

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kab. Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kab. Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kab. Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kab. Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Perangkat Daerah sebanyak 38 terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah (Biro) : 7 unit
Pergub Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
2. Inspektorat : 1 unit
Pergub Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
3. Dinas : 23 unit
Pergub Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
4. Badan : 6 unit
Pergub Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
5. Sekretariat DPRD : 1 unit
Pergub Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka.

Adapun jumlah pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebanyak 5.365 orang.

- f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebesar Rp. 2.775.738.991.930,58 dengan realisasi Rp. 2.523.964.985.606,30.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. permasalahan strategis pemerintah daerah;

Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

- a.) Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian.
- b.) Masih rendahnya nilai tambah sektor perikanan.
- c.) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi.
- d.) Masih rendahnya nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian.
- e.) Masih rendahnya nilai tambah sektor Industri Pengolahan dan perdagangan.
- f.) Masih rendahnya nilai tambah sektor ketenagalistrikan.
- g.) Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- h.) Masih adanya masyarakat yang menganggur.
- i.) Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan.
- j.) Masih rendahnya pendapatan masyarakat desa.
- k.) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur Pekerjaan umum.
- l.) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar.
- m.) Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan.

- n.) Masih rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat.
- o.) Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat.
- p.) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk.
- q.) Masih rendahnya kesejahteraan anak.
- r.) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan.
- s.) Masih rendahnya kualitas pemuda.

b. visi dan misi kepala daerah;

Visi Kepala Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

- 1) Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agribahari;
- 2) Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang amanah;
- 4) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 5) Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati, menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD. Program unggulan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. Pembangunan Bahari

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. Pengembangan Pariwisata

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas

UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

6. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

7. Pembangunan Pendidikan

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional

dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel.

8. Pembangunan Sosial

Fokus kegiatan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa miskin, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-PBI); Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin; Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak melalui program Provinsi Layak Anak (Provila); Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang; Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga; Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi melalui berbagai event olahraga baik tingkat Nasional maupun Regional.

9. Pembangunan Kesehatan

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan

koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

11. Pembangunan Berdemokrasi

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan laha; pegendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PENDIDIKAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	
	Peningkatan pelaksanaan pendidikan paud oleh kab/kota	
	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	
	Pencetakan Majalah Pendidikan	
	Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	
	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	
	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KESEHATAN
	pelayanan administrasi perkantoran	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PERHUBUNGAN
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelayanan administrasi perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS SOSIAL
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pengelolaan Data, Informasi Kesejahteraan Sosial	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Proposal Penerima Bantuan Keuangan APBD di Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	INSPEKTORAT DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PANGAN
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Pembangunan Gedung Kantor & Ruang Kantor	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PERTANIAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan disiplin aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KEHUTANAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	RAKORNAS Dinas ESDM	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Penyebaran data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	
	Pendataan Aset SKPD	
	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	
	Rapat Koordinasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Program Peningkatan Pelayanan	RUMAH SAKIT UMUM

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemerintah	PROVINSI
	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	RUMAH SAKIT JIWA
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Pendidikan	
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	
	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	
	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	
	Pengembangan Kurikulum SMA	
	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	
	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	
	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	
	Pengembangan Kurikulum SMK	
	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	
	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	
	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	
	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan Mutu PTK SMA	
	Peningkatan Mutu PTK SMK	
	Peningkatan Mutu PTK SLB	
	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	DINAS PENDIDIKAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Dana BOS Afirmas	
	Pengelolaan Dana BOS Kinerja	
	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Gegas (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)	
	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	
	Kesehatan	
	Program Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan kesehatan masyarakat	
	Upaya Peningkatan kesehatan Keluarga	
	Penurunan Angka kematian Ibu	
	Penurunan angka kematian bayi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	
	Peningkatan Penyehatan lingkungan	
	peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	
	BOX PROVINSI (Dak Non Fisik)	
	Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	DINAS KESEHATAN
	pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	
	Peningkatan pengendalian penyakit malaria	
	Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	
	Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	
	Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes militus)	
	Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	
	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	
	Program Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	
	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	
	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	
	Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan / SDMK	
	Peningkatan pelayanan kefarmasian	
	Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	
	Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Pelayanan dan Pendukung pelayanan	
	Program Pelayanan Teknis Keperawatan	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Penyusunan Standar Sarana dan Keperawatan	
	Penyusunan SOP Keperawatan	
	Audit Keperawatan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana (Logistik) Keperawatan	
	Pelayanan Keperawatan Berbasis IT	
	Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan	
	Peningkatan etika keperawatan	
	Penyusunan Uraian Tugas Keperawatan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyusunan Pedoman Pelayanan Keperawatan	
	Penyusunan Program Kerja Pelayanan Keperawatan	
	Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	
	Penyusunan Program Pengembangan SumerDaya Keperawatan	
	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	
	In House Training(IHT) Keperawatan	
	Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
	Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	
	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit	
	Pembangunan Gedung C	
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
	Penyusunan DED Rumah Sakit	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
	Pembangunan Gedung B	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	RUMAH SAKIT JIWA
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	
	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	RUMAH SAKIT JIWA
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	
	Penilaian Akreditasi	
	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite	
	Survey Kepuasan Masyarakat	
	Penyusunan Clinical Pathway	
	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	
	Promosi Kesehatan Jiwa	
	Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	
	Penyusunan Panduan Praktik Klinis	
	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	RUMAH SAKIT JIWA
	Penjangkauan Bebas Pasung	
	Discharge Planning	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	RUMAH SAKIT JIWA

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	
	Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	
	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	
	Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa	
	Pengembangan SIMRS	
	Pembangunan Rumah Dinas	
	Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	
	Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	
	Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan	
	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	
	Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	
	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Kebinamargaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pendamping DAK	
	Pembangunan Jalan PHNJD	
	Inspeksi Kondisi Jembatan	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan	
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jembatan	
	Operasional Jembatan Baturusa II	
	Inspeksi Kondisi Jalan	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	
	Leger Jalan	
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jembatan	
	Perencanaan Pembangunan Jalan	
	Pembangunan Jalan	
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	
	Pembangunan Jembatan	
	Program Pengembangan Sumber Daya Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pembangunan turap / talud / bronjong	
	Pembangunan Peningkatan Drainase	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
	Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	
	Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	
	Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	
	Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	
	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	
	Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	
	Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan Negara	
	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	
	Pengukuran dan Pemetaan Sempadan Pantai	
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	
	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	
	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Program Keciptakarya dan Permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	
	Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	
	Peningkatan / Penyediaan Sarana Air Limbah di Kawasan Kumuh	
	Pembangunan / Peningkatan Drainase/gorong-gorong di Kawasan Kumuh	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	
	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	
	Program Pembangunan Perumahan Rakyat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	
	Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	
	Survey dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	
	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	
	Perencanaan	
	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	
	Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	
	Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	
	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	
	Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	
	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	
	Program Perencanaan Sosial, Budaya	BADAN PERENCANAAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	dan Pemerintahan	PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	
	Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	
	Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	
	Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	
	Perhubungan	
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	DINAS PERHUBUNGAN
	Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	
	Pengoperasian Bus Sekolah	
	Pengadaan Bus Sekolah	
	Peningkatan Peralatan Area Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	
	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
	Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	
	Penyusunan RIP ASDP di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe-B	
	Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	
	Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	
	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	
	Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitas Pelabuhan/ Dermaga	
	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran	
	Survey dan Inventarisasi kebutuhan sektor perhubungan laut	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	
	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	
	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil	
	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	
	Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandarudaraan	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	
	Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	
	Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	
	Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir	
	Pengadaan Pagar Panel Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	
	Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan jalan	
	Pengadaan dan Pemasangan Billboard Keselamatan Lalu Lintas	
	Lingkungan Hidup	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	
	Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	
	Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	
	Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan	
	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	Kajian Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	
	Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	
	Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	
	Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	
	Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Program Peningkatan Pengendalian dan Penuaan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pengendalian Beban Pencemaran Air	
	Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	
	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	
	Identifikasi Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	
	Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Peningkatan Aksi Peduli Lingkungan	
	Pengelolaan Sampah Laut	
	Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional	
	Inventarisasi emisi gas rumah kaca	
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Rakor Teknis Pemanfaatan data base kependudukan kab/Kota	
	Pengembangan bank data kependudukan	
	Peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	
	Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi	
	Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung	
	Peningkatan kapasitas Apartur pengelola SIAK	
	Sosialisasi pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
	Sosialisasi tertib administrasi kependudukan melalui media	
	Pengelolaan pemanfaatan data kependudukan	
	Penyusunan buku profil perkembangan kependudukan	
	Konsolidasi data base kependudukan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	tingkat provinsi	
	Sosialisasi kebijakan pencatatan sipil	
	Peningkatan kapasitas aparatur bidang pencatatan sipil	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	
	Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota	
	Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	
	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	
	Pelatihan dan Pembentukan Fasilitator Pendidikan Politik Untuk Perempuan	
	Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	
	Pameran hasil karya perempuan	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	
	Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia	
	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA	
	Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak	
	Advokasi dan pembinaan KIE kebijakan Forum Anak kab/Kota	
	Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	
	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	
	Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	
	Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	
	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Sosialisasi Mengenai Perlindungan Hak	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Anak	
	Partisipasi Anak dalam pembangunan (Forum Anak)	
	TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	
	Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	
	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	
	Pelatihan konselor dan pendidik sebaya	
	Monitoring dan Evaluasi implementasi Grand Design Kependudukan	
	Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan kepada pelajar	
	Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga	
	Advokasi dan KIE program KKBPK	
	Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	
	Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
	Optimalisasi Kinerja Komda Lanjut Usia	
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	
	Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	
	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	
	Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
	Pembinaan Sosial Tuna Sosial	
	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
	Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	
	Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
	Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	
	Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	
	Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	
	Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	
	Program Penanganan Farkir Miskin	DINAS SOSIAL
	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	
	Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra dan BPNT	
	Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Wilayah Perdesaan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penguatan dan Peningkatan KUalitas Sosial Ekonomi Pra Sejantera	
	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	
	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	
	Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan	
	Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
	Peningkatan Kecintaan Terhadap Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
	Penyuluhan Sosial	
	Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	
	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	
	Peningkatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	DINAS SOSIAL
	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	
	Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	
	Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	
	Rehabilitasi Ringan Prasarana Panti	
	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	DINAS SOSIAL
	Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien	
	Sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	
	Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Dalam Panti	
	Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti	
	Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	
	Rehabilitasi ringan prasarana panti	
	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	
	Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat	
	Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi	
	Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	
	Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi,Kab/Kota	
	Pemeliharaan Jembatan Portable	
	Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	
	Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	
	Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	
	Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	
	Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	
	Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	
	Tenaga Kerja	
	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	DINAS TENAGA KERJA
	Pemetaan Pengawasan Ketenagakerjaan	
	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	Peningkatan sarana Hubungan Industrial	
	Pembinaan dan Penyelesaian PHK Pekerja Di luar Pengadilan HI	
	Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	
	Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	
	Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	
	Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	
	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA
	Sertifikasi Tenaga Kerja	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Bimtek Penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	
	Pembinaan dan Pengendalian TKA	
	Pemasaran Tenaga kerja (Job Convassing)	
	Bimtek metodologi bagi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja Di UMKM	
	Pengujian Lingkungan Kerja	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	DINAS TENAGA KERJA
	Pemasaran UPTD Balai Latihan Kerja	
	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	
	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA
	pelayanan dan peningkatan produktivitas	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	
	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	
	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	
	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	
	Peningkatan kualitas kewirausahaan	
	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	
	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	
	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM	
	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	
	Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM	
	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	
	Penanaman Modal	
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
		SATU PINTU
	Studi Kelayakan Potensi Investasi	
	Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah	
	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	
	Pelaksanaan matchmaking daerah	
	Workshop Pengembangan usaha daerah	
	Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)	
	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	
	Pembuatan Bahan Promosi	
	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Workshop laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Online	
	Pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal	
	Bimbingan dan penyelesaian masalah penanaman modal	
	Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP	
	Rakor Forum PTSP se-Provinsi kepulauan bangka Belitung	
	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Kebudayaan	
	Program Pelestarian Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Kajian Tradisi Bangka Belitung	
	Pengelolaan cagar budaya	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	
	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	
	Pentas seni budaya	
	Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	
	Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	
	Festival Budaya Melayu	
	Kepemudaan dan Olahraga	
	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	0	
	Pemberdayaan Peran serta Pemuda	
	Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	
	Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi yang Berdedikasi dan Berprestasi	
	Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	
	Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	
	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	
	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	
	Bangka Belitung Sport Tourism	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
	Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	
	Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	
	Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	
	Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	
	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
	Patroli	
	Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	
	Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	
	Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	
	Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	
	Program Penegakan Perda dan Perkada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada	
	Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	
	Penatakelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel	
	Rapat Koordinasi Satpol PP se-Provinsi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kep. Babel dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Simulasi akbar pemadam kebakaran	
	Jambore satlinmas seprovinsi kepulauan Bangka Belitung	
	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se provinsi kepulauan Bangka Belitung	
	Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas	
	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	
	Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	
	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Penguatan Wawasan Kebangsaan	
	Penguatan Pembauran Kebangsaan	
	Pembinaan Ideologi Kebangsaan	
	Penguatan Bela Negara	
	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembinaan Politik Daerah	
	Penguatan Kelembagaan Parpol	
	Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	
	Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	
	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	
	Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	
	Pencegahan dan penanggulangan Napza	
	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH
	Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Forum Pengembangan Ekonomi	
	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring, Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH
	Monitoring dan Evaluasi Sektor Hulu dan Hilir Migas	
	Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	
	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengembangan Kemitraan BUMD	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	
	Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	
	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	
	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	
	Koordinasi Kebijakan APBN	
	Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DPRD
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	
	Rapat-rapat paripurna	
	Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	
	Pembahasan anggaran pemerintah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	prov.kep.babel	
	Kunjungan kerja badan anggaran	
	Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	
	Kunjungan kerja badan kehormatan	
	Reses	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	
	Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	
	Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	
	Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	
	Kunjungan kerja komisi	
	Kunjungan kerja badan musyawarah	
	Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	SEKRETARIAT DPRD
	Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	
	Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	
	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	INSPEKTORAT DAERAH
	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan E-LHKPN	
	Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korszupgah	
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	
	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	
	Penilaian Internal Zona Integritas	
	Monev Laporan Gratifikasi	
	Penanganan Whistle Blower System	
	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	INSPEKTORAT DAERAH
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	
	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	
	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	
	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	
	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	INSPEKTORAT DAERAH
	Peningkatan sistem aplikasi pengawas	
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	
	Sosialisasi SPIP	
	Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	
	Konsultasi Audit	
	Survei Penilaian Integritas	
	Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	
	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	
	Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	
	Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	
	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	
	Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	
	Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	
	Pangan	
	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	DINAS PANGAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	
	Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	
	Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Pangan	
	Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Pangan dalam Mendukung Perekonomian Daerah	
	Business Plan Pengembangan Komoditas Pangan Potensial	
	Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	
	Pengembangan Daerah Mandiri Pangan	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	
	Penyusunan dokumen ketersediaan dan akses pangan	
	Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	DINAS PANGAN

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	
	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	
	Pengendalian Distribusi Pangan	
	Pengembangan Cadangan Pangan	
	Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	
	Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	
	Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Pangan	
	Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	DINAS PANGAN
	Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	
	Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	
	Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL	
	Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	
	Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	
	Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	
	Pengembangan produk pangan lokal hasil pertanian (one village one product)	
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	
	Penilaian Pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat produk pertanian (Prima 3, Prima 2 dan No registrasi PSAT)	
	Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Program Pembinaan Pemerintah Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	
	Penataan Kewenangan Desa	
	Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa berbasis SIPADES	
	Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pendampingan Kelembagaan Desa	
	Pemberdayaan Masyarakat	
	Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	
	Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam,	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	
	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Peningkatan Kualitas Tenaga Ahli Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	Statistik	
	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektor dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	
	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektor Daerah	
	Pengembangan Satu Data/ One Data	
	Komunikasi dan Informatika	
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	Pengelolaan Kemitraan	
	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	
	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	
	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	
	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	
	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Perpustakaan	
	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	
	Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	
	Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	
	Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	
	program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	
	Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan	
	Kegiatan Akreditasi Perpustakaan	
	Pertanian	
	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	DINAS PERTANIAN
	Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	
	Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya saing	
	Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	
	Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	
	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	DINAS PERTANIAN
	Pembinaan asuransi usaha tani	
	Pemberian asuransi peternakan	
	Fasilitasi asuransi pertanian	
	Pengembangan optimasi lahan	
	Pembangunan jaringan irigasi tersier	
	Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
	Pembangunan jalan produksi pertanian	
	Rembug Tani Nasional	
	Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	
	Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	
	Program Pengembangan Perkebunan	DINAS PERTANIAN
	Intensifikasi tanaman perkebunan	
	Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	
	Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	
	Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	
	Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	DINAS PERTANIAN
	Peningkatan populasi ternak	
	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	dan Gangguan Reproduksi	
	Pengawasan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	DINAS PERTANIAN
	Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	
	Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	
	Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	
	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	DINAS PERTANIAN
	Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	
	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	DINAS PERTANIAN
	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	
	Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	
	Pembangunan akses informasi perbenihan	
	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	
	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	
	Integrasi jagung dan sapi	
	Kehutanan	
	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	DINAS KEHUTANAN
	Pemanfaatan Kawasan Hutan	
	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	
	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	
	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	
	Penyelesaian usulan perubahan sttus kawasan hutan/TORA	
	Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	
	Pembangunan Kantor KPH/Kantor Resort KPH (DAK Kehutanan)	
	Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan)	
	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	DINAS KEHUTANAN
	Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	
	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	
	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem essensial	
	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan	
	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	
	Perlindungan dan pengamanan hutan (DBH DR)	
	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KEHUTANAN
	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Rambat Menduyung (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh KPHP Jebu Bembang Antan (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Bubus Panca (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Sungai Sembulan (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Muntai Palas (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHP Gunung Duren (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan UPTD KPHL Belantu Mendanau (DBH DR)	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
	Pengembangan Perhutanan Sosial	
	Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	
	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	
	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	
	Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DA K Kehutanan)	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHL Belantu Mendanau	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	
	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	
	Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyajian data dan peta potensi Sumber Daya Mineral	
	Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta	
	Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan	
	Identifikasi Potensi Mineral ikutan	
	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	
	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	
	Verifikasi , Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	
	Pembinaan Pengembangan dan Pemerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Social Responsibility / CD-CSR)	
	Penyusunan dokumen IPR (Izin Pertambangan Rakyat) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	
	Pertemuan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tingkat Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyusunan Naskah Akademis pengelolaan pertambangan	
	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pemeliharaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Optimalisasi lifing MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS)	
	Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pariwisata	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	
	Pengembangan kawasan pariwisata provinsi	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas Sektor Pariwisata	
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	
	Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	
	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Kajian Pemasaran Pariwisata	
	Pelaksanaan Promosi Geowisata	
	Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	
	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	
	Pelayanan Informasi Pariwisata	
	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata	
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	
	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	
	Pelaksanaan Fam Trip	
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	
	Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	
	penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	
	Penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner	
	Pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	
	Peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	
	Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	
	Partisipasi Event Festival Nusantara	
	Kelautan dan Perikanan	
	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembangunan Dermaga Jetty	
	Desalinasi Air Laut	
	Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	
	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	
	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi perairan (DAK)	
	Peningkatan Fungsi BOOST Center	
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	
	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	
	peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap	
	Peningkatan dan Pengembangan PPI	
	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	
	Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	
	peningkatan kesejahteraan nelayan	
	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se-Bangka Belitung	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	
	Percontohan Budidaya Perikanan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Cold Storage	
	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	
	Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	
	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	
	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	
	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pengawasan sumber daya kelautan	
	Pengawasan sumber daya perikanan	
	Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Peningkatan fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
	Pembinaan, supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan	
	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	
	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	
	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	
	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	
	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Laut	
	Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (air Laut) (DAK)	
	Perdagangan	
	Program Pengembangan Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pasar murah	
	Partisipasi Pepper Day	
	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	
	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	
	Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	
	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	
	Peningkatan dan perluasan akses pasar	
	Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Informasi perdagangan dalam negeri	
	Perindustrian	
	Program Pengembang Wilayah dan Pengawasan Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	
	Pengembangan Kawasan strategis/kawasan industri/sentra	
	Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	
	Pendataan Perizinan Industri	
	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Lokal	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	
	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	
	Rumah Pengembangan Produk	
	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	
	Pemberdayaan Dekranasda	
	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	
	Pelaksanaan Penentuan Penegakan hukum pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	
	Pengawasan Tertib Niaga	
	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	
	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	
	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	
	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	
	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	
	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	
	Monitoring Mutu Pengujian	
	Transmigrasi	
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA
	perencanaan pembangunan Kawasan transmigrasi	
	Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	
	peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	
	Keuangan	
	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	
	Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	
	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	
	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	
	Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	
	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	
	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	
	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	
	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	
	Sosialisasi Pajak Daerah	
	Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	
	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	
	Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	
	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	
	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	
	Penyusunan Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	
	Penyusunan KUA dan PPAS	
	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	
	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	
	Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	
	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	
	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	
	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	
	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyusunan regulasi/Kebijakan bidang akutansi dan pelaporan	
	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	
	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	
	Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	
	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	
	Penyusunan Regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah	
	Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	
	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	
	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyusunan laporan barang milik daerah	
	Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	
	Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	
	Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	
	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	
	Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Perencanaan ASN	
	Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	
	Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	
	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	
	Promosi dan Mutasi ASN	
	Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Peningkatan Kesejahteraan ASN	
	Pengembangan Profesi ASN	
	Pembinaan ASN	
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	
	Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	
	Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	
	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	
	Peningkatan Pendidikan Formal	
	Peningkatan Mutu Kediklatan	
	Persandian	
	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	
	Kearsipan	
	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	
	Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung	
	Arsip Masuk Desa	
	Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	
	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	
	Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/kota Provinsi kep. Bangka Belitung	
	Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kab/Kota	
	Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penelitian dan Pengembangan	
	Program Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	
	Penguatan Jaringan Kelitbangan	
	Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	
	Sekretariat Daerah	
	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi administrasi kewilayahan	
	Kegiatan perapatan dan pembangunan pilar batas daerah	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	
	Kegiatan penegasan batas daerah	
	Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data rupabumi	
	Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data pulau di prov. kep. bangka belitung	
	Program Pengembangan Otonomi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan implementasi proses pergantian antar waktu DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan calon anggota DPRD Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	
	Kegiatan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Kegiatan peresmian pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah di prov. kep. bangka belitung	
	Kegiatan optimalisasi penerapan dan pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) Prov. Kep. Bangka Belitung	
	Kegiatan administrasi izin keluar negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke luar negeri	
	Kegiatan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren (UPK)	
	Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan	
	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Kegiatan pengembangan kerjasama daerah	
	Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	
	Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	
	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	
	Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	
	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	
	Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	
	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	
	Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	
	Evaluasi dan Analisa Proposal Bansos dan Hibah	
	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembentukan Peraturan Daerah	
	Penyusunan Produk Hukum Daerah	
	Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	
	Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	
	Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	
	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	
	Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Belitung	
	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat/Badan Hukum secara Litigasi atau Non Litigasi	
	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	
	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum	
	Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	
	Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Perencanaan Setda	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	
	Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	
	Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	
	Peningkatan Capaian Realisasi APBD	
	Peningkatan Fungsi Sismontepa APBD Provinsi, Kab/Kota	
	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	
	Pengelolaan data dan informasi	
	Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	
	Peningkatan Pelayanan Publik	
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	
	Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	
	Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	
	Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	
	Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	SEKRETARIAT DAERAH
	Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Validasi Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Analisa beban kerja jabatan apratur sipil negara pada perangkat daerah dilingkungan pemrintah provinsi kepulauan bangka belitung	
	standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	
	Manajemen Perubahan	
	Penigkatan Akuntabilitas Kinerja	
	Data dan Informasi Kinerja	
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	
	Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Peningkatan administrasi ketatausahaan	
	Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	SEKRETARIAT DAERAH
	Publikasi Media Massa / Cetak	
	Publikasi Media Elektronik/IT	
	Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	
	Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah	

No.	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah
1	2	3
	Provinsi	
	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	
	Peningkatan Fungsi Keprotokolan	
	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	
	Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	
	Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan Keprotokolan	

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu

pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perubahan paradigma lainnya mengenai SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Telah ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Oleh sebab itu, bukan kinerja pemerintah

daerah yang menjadi prioritas utama melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung. Hal tersebut dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Kebijakan Umum

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan kebijakan umum dan program pembangunan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah telah memuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Selanjutnya dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut. maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. ***Berbasis potensi daerah*** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.
- 2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;**
Pernyataan misi ini mengandung makna:
- a. ***Infrastruktur*** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 - b. ***Konektivitas daerah*** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
- a. ***Sumber daya manusia*** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. ***Unggul dan handal*** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- 4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :
- a. ***Tata Kelola Pemerintahan yang baik*** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
 - b. ***Pembangunan demokrasi*** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**
Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan.
2. Pembangunan Bahari.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.
5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah.
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .
7. Pengembangan Energi dan Infrastruktur dan Infrastruktur Kewilayahan.
8. Pembangunan Pendidikan.
9. Pembangunan Kesehatan.
10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.
11. Pembangunan Berdemokrasi.
12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan.
13. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2020 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait langsung dengan penerapan SPM diwujudkan antara lain melalui beberapa prioritas antara lain: **pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata**

kelola birokrasi dan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan bidang kebencanaan.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Arah Kebijakan

Tahun 2020 adalah merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat**”.

Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,3	71,47	0,24
2	Angka Kemiskinan	4,5	4,89	8,86
3	Angka Pengangguran	3,58	5,25	46,64
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,32	-2,3	-169,27
5	Pendapatan Per kapita	50.911.426	49.772.286	-2,24
6	Ketimpangan Pendapatan	0,262	0,257	-1,91

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	73	Dapodik per tanggal 13-01-2021	
		Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.100	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.100	Keputusan Kepala Dinas Pendidikn Prov. Kep, Babel	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	24.750	Dapodik per tanggal 13-01-2021	Sekolah negeri
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.392	Dapodik per tanggal 13-01-2021	Sekolah negeri
		Jumlah kebutuhan Minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 1.963	AnalisisKebutuhan Guru SMA; Dapodik, Oktober 2020	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2.131	dapodik	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah Atas (Negeri dan Swasta)	1.821	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1.757	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga Kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Min. 497 tenaga kependidikan	AnalisisKebutuhanTendikberdasarkan SNP	Kepala TU (1 orang), Tenaga administrasi (3 orang), KepalaPerpustakaan (1 orang), Tenaga Perpustakaan (1 orang), Laboran (1 orang), Min. 7 x 71 sekolah = 497
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	683	Analisis GTK	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	753	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	682	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang	680	Dapodik per tanggal 12-01-2021	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	669	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	8	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang	25	Dapodik per tanggal 12-01-2021	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	334	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	318	Dapodik per tanggal 12-01-2021	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	64%		
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	25		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	0		
		Jumlah SDM di pos kesehatan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	0		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		Jumlah kegiatan Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	0		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	0		
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang Kemungkinan KLB Lintas kabupaten/kota	11		
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	33.461,41 ha		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	140,709,45 m2		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 ha		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	12,590 m		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Tanggul : 21.499 m Talud : 6,735 m		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)			
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	196,76 ha		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS	12,590 m'		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kewenangan provinsi (m)			
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Revetment, Bulekhead		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	11,42%		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3,06%		
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		Kewenangan DISTAN
		Pemenuhan dokumen RISPAM Lintas kabupaten/kota	0		
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0		
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SPAM			
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0		
		Jumlah SPALD Regional	0		
		Total kapasitas SPALD Regional	0		
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0		
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0		
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	850,99 km		
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak ada		
		Panjang jalan yang dibangun	0		
		Panjang jembatan yg dibangun	0		
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	34,45 km		
		Panjang jembatan yang diganti /dilebarkan	0		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21,1		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Panjang jalan yang dipelihara	711,58		
		Panjang jembatan yang dipelihara	3.508,75 m		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1.916 orang		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1.221 orang		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada		
		Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja(LPKK)			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0		Tidak ada bencana tahun 2020
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
		Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	112,44 ha		
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	20 unit		
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0		
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
		Jumlah pengembang yang teregistras	0		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	22.635 orang		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.060 orang		
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	149 unit		
		Jumlah Perda Perkada yang ditegakkan dan	3 perda/perkada		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10 orang		
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	21 SOP		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana	Tidak Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kontijensi provinsi			
		Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1 kegiatan		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Tidak ada		
		Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Tidak ada		
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada Tim Reaksi Cepat Provinsi		
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1 kegiatan		
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	11 jenis		
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	18 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	18 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2 asrama		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 pak obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1 orang ASN, 4 orang PHL		
		Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	1 unit alat tensi meter, 1 unit timbangan		
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 orang ASN, 4 orang PHL		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	12 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 Bimbingan)		
		Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Kependudukan di dalam panti	1 orang a.n Saiman		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	18 orang		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	27 orang		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	27 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan ringan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 unit timbangan badan, 1 pak obat, 1 unit tensi digital, 1 unit alat ukur tinggi badan		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos)	5 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		medis) yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	4 paket bimbingan		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	0		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	27 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	27 orang		
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	27 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket	6 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi			
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	6 orang		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1 unit		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	2 unit		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 paket obat-obatan		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	5 orang		
		Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	2 orang		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sepanjang hari dalam setahun (3 paket bimbingan)		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam panti			
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	6 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	6 orang		
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	2 orang		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga			
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0		
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	635 orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	392 orang		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	93 orang		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	427 orang		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	24 orang		
		Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	444 orang		
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Ada		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak ada		
		Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kerja			
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Tidak ada		
		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	100%		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0,02%		
		Persentase penganggur yang dilatih	0		
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	13,75%		
		Persentase penyerapan lulusan	0		
		Persentase LPK yang terakreditasi	0		
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) diberikan pelatihan	0		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia(CPMI/CTKI)	0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0		
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jejaring peningkatan produktivitas			
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	34%		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	134%		
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	12.949 orang		
		Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	0		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	92%		
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	0		
		Persentase jumlah perusahaan Yang berselisih	6,8%		
		Jumlah mogok kerja	3 perusahaan		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	1 kasus		
		Jumlah perselisihan hak	65 kasus		
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	35 kasus		
		Jumlah perselisihan PHK	72 kasus		
		Jumlah pekerja/buruh yang	836 orang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ter-PHK			
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	62 kasus		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada		
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 3.230.023,66		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	82,08%		
		Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Tidak ada		
		Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Tidak ada		
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	1		
		Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam	100.006 lowongan		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		satu wilayah provinsi			
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	33 orang		
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	5 orang		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada		
		Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Tidak ada		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK)	0,008%		
		online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)			
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	0		
		Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) yang diterbitkan	0		
		Jumlah pos	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)			
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	263 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	221 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	175 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	194 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	226 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	87 perusahaan		
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapoer Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	1.598 perusahaan		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih	32 Perangkat Daerah		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PUG			
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	23 Perangkat Daerah		
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 (Bangka Pos)		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		Data dukung belum TTD
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 (PATBM)		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1 lembaga (KPAD)		
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak	1 (UPTD)		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perempuan yang telah terstandarisasi			
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Satgas PPA		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas Pemerintah Provinsi (APBD provinsi) oleh Daerah	0		
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada		
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada		
		Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	14,77%		
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada		
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	5 kali		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada		
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada		
		Tertanganinya	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kejadian kerawanan pangan			
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada		
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada		
10	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0		
		Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
		Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	0		
		Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100%		
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin	2,94%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi			
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	77,27%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100%		
		Fasilitasi pelayanan Adminduk	100%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		Desa tertinggal
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		Desa tertinggal
		Jumlah lembaga kemasyarakatan	0		Desa tertinggal

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		Desa tertinggal
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	11-8		
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100%		
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	93,52%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-	Ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perdakan			
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,1		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28,2		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	77,7%		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	35		
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	9,76%		
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,43%		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	(pokja advokasi sudah terbentuk di 7 kab/kota namun belum efektif)		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	77,97%		
		Persentase kesertaan KB di	7,14%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah			
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	42,73%		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	0		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	100%		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	36,41%		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,8%		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	96,8%		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra	Ya		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	59,37%		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50%		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	12,5%		
		Persentase	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perangkat daerah yang mengimplementai inovasi yang mendukung smart city			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	67,45%		
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	21,8%		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	62,5%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,3%		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	70%		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan	40%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,4%		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	2,6%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,66%		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,60%		
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0		
		Persentase jumlah	0,55%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha			
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan Fasilitas pemasaran	1,38%		
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	2,5%		
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	1,44%		
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi tanggal 28 Juli 2017		
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
		Kegiatan pameran penanaman modal	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	14 pengaduan		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	837		
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 2.561.150.700.000,-		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	75 aparatur		
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	68 perusahaan PMA dan PMDN		
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	668 data		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	35		
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	136		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		organisasi kepemudaan			
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Pelatih PPLP = 5 orang SKO = 14 orang		
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	PPLP = 19 Orang SKO = 71 Orang		
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 event		
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	76		
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	0		
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada "Potensi dan Pesona Bumi Serumpun Sebalai Tahun 2020"		
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0		
		Jumlah survey Statistic sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
		Persentase	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral			
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	0		
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	15,38		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3,30		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	3,1		
22	Kebudayaan	Jumlah obyek	9		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemajuan kebudayaan yang dilindungi inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)			
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	9		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	86+174=260		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	53-0=53		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi,	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemeliharaan dan pemugaran			
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak ada		
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1		
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1		
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	3.724 orang		
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Tidak ada		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	5		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6		
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7		
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	9		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	5		
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada		
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	5		
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak ada		
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,676%		
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0,00134%		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,00191%		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,52%		
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	pengunjung perpustakaan = 5.926 orang, pusling = 2.036 orang, total pengunjung perpustakaan = 7.962 orang target pengunjung tahun 2020 = 12.500 orang		
		Jumlah KCKR	1.363 judul		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah yang dihimpun	dan 2.119 eksemplar		
		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	925		
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	13		
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	237		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	67,05%		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2 dokumen		
		Perlindungan dan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	1		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	5		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber dayanya (wpp)	1 WPP		
		Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		berukuran 5-30 GT			
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	0,43%		
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	0		
		Jumlah kapal yang terdaftar	0		
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
		Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100		
		Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	82,23%		
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	14 kapal		
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan	- Pembudi daya yang diperiksa = 30		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	pelaku usaha - memiliki izin 15 pelaku usaha - tidak memiliki izin 15 pelaku usaha		
		Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	- UPI yang diperiksa 26 UPI - Memiliki izin 19 UPI - Tidak memiliki izin 7 UPI		
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Belum ada yang diperiksa		
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	33		
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2		
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Tidak ada		
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Tidak ada		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Tidak ada		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,89 hari		
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,84 hari		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2.476 orang		
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	221.475 orang		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak ada		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Tidak ada		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak ada		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Tidak ada		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor	Tidak ada		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepariwisataan			
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tidak ada		
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	46		
		Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Pangan 24, hortikultura 13		
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	33		
		Prasarana pertanian yang digunakan	100%		
		Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	58 kegiatan		
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	1 ha		
		Penerbitan izin usaha pertanian	Pangan 5, hortikultura 9		
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100%		
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100%		
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Pangan 83%, hortikultura 100%		
28	Kehutanan	Dokumen penataan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		hutan wilayah KPH			
		Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	20,33		
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	4.206 ha		
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,086%		
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	4,46%		
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m ³ per tahun yang aktif	100%		
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Ada		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	4 kelompok, 135 orang		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	138 ha		
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	80%		
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	31,25%		
		Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	83,33%		
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok	164		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perhutanan sosial			
		Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	1,38%		
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	5		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda No 5 Tahun 2016 tentang Konservasi Sumber Daya Air		
		Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Ada		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaa nair tanah Provinsi Kep. Babel dan Pergub Nomor 40 Tahun 2015 tentang tata cara peberbitan perizinan air tanah		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Pergub Nomor 17 Tahun 2019 tentang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nilai perolehan air tanah		
		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kep. Babel tahun 2020-2040		
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral, perda nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah di Provinsi Kep. Babel dan Pergub Nomor 59 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			logam dan batuan, penyesuaian izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan afiliasi serta izin pertambangan rakyat		
		Perda/Pergub terkait IUJP	Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral,		
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Pergub Nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan harga patokan bukan logam dan batuan di wilayah Provinsi Kep. Babel		
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		Koordinasi dengan DPMPTSP
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak ada		
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak ada		
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	ketenaga listrikan daerah		
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketenaga listrikan		
		Pelaksanaan pembangunan	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu			
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	20%		
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh Fasilitas pengembangan produk	43%		
		Persentase pelaku usaha yang Memperoleh pelatihan/fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	33,33%		
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	10%		
		Jumlah penanganan pengaduan konsumen	108		
		Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	102		
		Jumlah komoditi potensial yang dipantau	1		
		Indeks Kinerja BPSMB	4		
		Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%		
		Pengawasan pupuk dan pestisida Terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	51 barang		
		Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,74%		
		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	110%		
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	37,74%		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	54,7%		
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 kawasan		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 kawasan		
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	0		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	81,68		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	58,25		
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,15%		
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%		
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	4,03%		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	15,30%		
		Rasio luas daerah	10,28%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0		PERKIM
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0		PERKIM
		Rasio kemantapan jalan	91,54%		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	63,72%		
4	Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0		
5	Ketenteraman, Ketertiban	Persentase gangguan Trantibum	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum dan Perlindungan Masyarakat	yang dapat diselesaikan			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	50%		
		Persentase penanganan pra bencana	42,86%		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	90%		
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	112,50%		
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	35,83%		
7	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang	28,57%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menyusun rencana tenaga kerja			
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			PDRB (nunggu data BPS)
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	125,21%		
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,027%		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	16,65%		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,00068%		
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,1%		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	16,5%		
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0,0012%		
10	Pertanahan	Persentase	0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota			
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	0		Tidak ada data, karena hasil perhitungan dari pusat belum diterima oleh DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	14,28%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100%		
		Pemanfaatan data kependudukan	96,96%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,61%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,31%		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	77,7%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Prevalence Rate/mCPR)			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,04%		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	46,3%		
		V/C Ratio di Jalan Provinsi	35,5%		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,8%		
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	13%		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	73,37%		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	14,67%		
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	39,68%		
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,02%		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	0,08%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		organisasi sosial kemasyarakatan			
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	87,50		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	90,6		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	1		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	66,76%		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0%		
25	Kelautan dan	Jumlah Total	219.034		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perikanan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton		
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	68,96%		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	73,25%		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	55,43%		
		Tingkat hunian akomodasi	22,19%		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0		Masih nunggu data BPS
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,30 ton/ha		
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	77%		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	18,18%		
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	4,30%		
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	20,33%		
29	Energi dan Sumber Daya	Persentase Usaha Tambang Sesuai	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mineral	Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda			
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100		
30	Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	8,73%		
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	100%		
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	96,52%		
		Tertib Usaha	0		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	99,98%		
		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	7,8%		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	9,74%		
31	Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	6%		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	37,74%		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	25%		
32	Transmigrasi				Tidak ada IKK outcome

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,30		
		Rasio PAD	0		Nunggu data BPS
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	13,48		
		Opini Laporan Keuangan	WTP		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2+		
2	Pemerintahan (Pengadaan)	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0		Surat pernyataan
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	2,21%		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	82,91%		
3	Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	512,03%		
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,80%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	0		

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan)			
4	Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,38		
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-28,84		
		Assets Management			
		Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,73		
5	Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	100		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian

kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.3.1
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,45	4,00
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	477.181
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,24
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,63	0,73
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	2,86
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,26
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,30

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	5,00
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	6,02
10	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	2,08
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,00
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	9,00
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,48
		Angka kematian ibu	21	33
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,12

No	Uraian	Indikator kinerja	Target Tahun 2020	Target akhir RPJMD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Angka Stunting	24	7,20
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Indeks RB	67,41	75
15	MeningkatnyaAspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	87,82
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	81,85
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	80,54
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,35
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	69,88

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	7,78	246,98	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor	3,45	9,76	282,89	Sangat Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perikanan				
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	223.951	103,04	Berhasil
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,02	50,00	Kurang Berhasil
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,63	-9,23	-1.500	Kurang Berhasil
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	-5,64	-451	Kurang Berhasil
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,85	Sangat Berhasil
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,25 (Agus 2020)	103,23	Sangat Berhasil
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	4,53 (Maret 2020)	128,22	Sangat Berhasil
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	1,08	370,37	Sangat Berhasil
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,35	Sangat Berhasil
11	Meningkatnya konektivitas	Rasio Ketersediaan	0,10	0,10*	100,00	Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	antar wilayah	Transportasi layak jalan				
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100,00	Berhasil
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,84*	140,00	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,05	99,75	Berhasil
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	8,06	100,37	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,64	99,92	Berhasil
		Angka kematian ibu	21	26	80,76	Berhasil
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,15	100,1	Sangat Berhasil
		Angka Stunting	24	9,7	247,42	Sangat Berhasil
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	Berhasil
		Indeks RB	67,41	66,84	99,15	Berhasil
15	Meningkatnya Aspek	Skor aspek kebebasan	87.76	84,12	95,85	Berhasil

No	Uraian	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kebebasan sipil	sipil				
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	75.48	92,29	Berhasil
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	71.71	89,24	Berhasil
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,40	160	Sangat Berhasil
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	65,80	110,02	Sangat Berhasil

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,22	7,78	Naik 3,56
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	8,11	9,76	Naik 1,65
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	438.373	223.951	Turun 214.422

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		domestik			
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,13	0,02	Turun 0,11
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,87	-9,23	Turun 8,36
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,17	-5,64	Turun 4,47
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,27	0,27	TETAP
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	3,62	5,25	Naik 1,63
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,50	4,50	TETAP
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,62	1,08	Naik 1,54
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	1,98	1,70	Naik 0,28
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	TETAP

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	TETAP
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,84	0,60*	TETAP
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,87	12,05	Naik 0,18
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,98	8,06	Naik 0,08
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,50	70,64	Naik 0,14
		Angka kematian ibu	137,34	26	Naik 111,34
		Angka Kematian Bayi	7.16	7,15	Naik 0,01
		Angka Stunting	7,70	9,7	Turun 2
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	TETAP
		Indeks RB	65,39	66,84	Naik 1,45
15	MeningkatnyaAspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	84,12	84,12	TETAP

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	75.48	75.48	TETAP
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	71.71	71.71	TETAP
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,24	0,40	Naik 0,16
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,80	65,80	TETAP

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel 2.3.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	5,15	7,78	151,06	MELEBIHI TARGET 2,63
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4,00	9,76	244	MELEBIHI TARGET 5,76
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	477.181	223.951	46,93	MASIH TERSISA 214.422
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,24	0,02	8,3	MASIH TERSISA 0,22
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,73	-9,23	-1.264,3	MASIH TERSISA 9,96
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,86	-5,64	- 197,2	MASIH TERSISA 8,5

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,8	MELEBIHI TARGET 0,01
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,30	5,25	100,9	MELEBIHI TARGET 0,05
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,00	4,50	111,1	MELEBIHI TARGET 0,5
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,02	1,08	557,4	MELEBIHI TARGET 4,94
10	Terkendalanya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,3	MELEBIHI TARGET 0,38
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	100	SUDAH TERCAPAI
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100	SUDAH TERCAPAI
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60*	100	SUDAH TERCAPAI
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki,	12,00	12,05	100,4	MELEBIHI TARGET 0,05

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kat	Angka harapan lama sekolah perempuan)				
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,00	8,06	89,5	MASIH TERSISA 0,94
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,48	70,64	100,2	MELEBIHI TARGET 0,16
		Angka kematian ibu	33	26	126,9	MELEBIHI TARGET 7
		Angka Kematian Bayi	7,12	7,15	99,5	MASIH TERSISA 0,03
		Angka Stunting	7,20	9,7	74,2	MASIH TERSISA 2,5
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	SUDAH TERCAPAI
		Indeks RB	75	66,84	89,12	MASIH TERSISA 8,16
15	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,82	84,12*)	97,78	MASIH TERSISA 3,7
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,85	75,48*)	92,2	MASIH TERSISA 6,37
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,54	71,71*)	89,03	MASIH TERSISA 8,83

No	Uraian	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020	Persentase Pencapaian	Status Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	si					
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,35	0,40	114,2	MASIH TERSISA 0,05
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,88	65,80 *)	94,16	MASIH TERSISA 4,08

Ket :

*) Data Tahun 2019

Data Tahun 2020 masih menunggu rilis dari BPS.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya Anggaran

Tabel 2.3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	3,15	7,78	246,98	24.638.667.049	23.108.619.870	93,79	6,21
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,45	9,76	282,89	12.069.013.551	11.330.150.350	93,88	6,12
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan domestik	217.345	223.951	103,04	236.991.039	236.989.039	100,00	0
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,04	0,02	50,00	169.934.855	160.609.225	94,51	0
4	Meningkatnya Produksi sektor	Persentase Pertumbuhan Produksi	0,63	-9,23	-1.500	978.601.330	840.350.871	85,87	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pertambahan	sektor pertumbuhan dan penggalan							
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,25	-5,64	-451	7.021.362.415	6.200.786.695	88,31	0
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,26	0,27	103,8	7.609.149.091	6.597.832.086	86,71	13,29
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	5,42	5,25	103,23	13.690.635.129	12.206.784.330	89,16	10,84
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,77	4,50	128,22	6.083.561.448	5.390.172.000	88,60	11,4
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4	1,08	370,37	566.448.000	552.422.425	97,52	2,48
10	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,08	1,70	122,35	566.063.900	539.560.881	95,32	4,68
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	100,00	269.638.306.514	256.120.787.846	94,99	5,01
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	100,00	3.396.375.071	3.162.777.639	93,12	6,88
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,60	0,60*	100,00	7.719.104.078	7.650.733.559	99,11	0,89
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	12,08	12,05	99,75	27.949.566.700	26.981.245.840	96,54	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Th 2020	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	8,06	100,37	252.923.456.201	158.146.374.720	62,53	37,47
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,7	70,64	99,92	4.829.206.995	2.979.058.411	61,69	0
		Angka kematian ibu	21	26	80,76	25.509.569.195	23.143.441.636	90,72	0
		Angka Kematian Bayi	7,16	7,15	100,1	29.147.452.750	24.982.795.426	85,71	14,29
		Angka Stunting	24	9,7	247,42	137.683.083.816	132.371.602.337	96,14	3,86
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	3.527.325.869	2.349.747.412	66,62	33,38
		Indeks RB	67,41	66,84	99,15	72.531.455.042	67.790.577.694	93,46	0
15	Meningkatnya Aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	87,76	84,12*)	95,85	65.326.780	63.012.880	96,46	0
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	81,79	75,48*)	92,29	899.937.412	854.312.860	94,93	0
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	80,36	71,71*)	89,24	3.293.354.421	2.909.094.233	88,33	0
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,25	0,40	160	23.016.451.360	20.745.967.410	90,14	0
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,81	65,80 *)	110,02	7.653.059.998	7.016.394.214	91,68	8,32
<p>TOTAL EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2020 ADALAH</p> <p>Rp. 116.195.417.744,-</p> <p><i>(Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratur Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)</i></p>									

Ket : *) Data Tahun 2019 Data Tahun 2020 masih menunggu rilis dari BPS.

Tingkat efisiensi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Semakin inerja sasarnya tercapai dan penganggarannya masih bersisa dapat dikatakan telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan penghitungan,

maka akan diketahui efisien atau tidaknya penggunaan anggaran terhadap pencapaian target sasaran yang sudah ditetapkan.. Dalam memberikan penilaian tingkat efisiensi dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Skala Pengukuran Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja

No	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Anggaran	Kategori
1	100 % s.d. diatas 100 %	< 100	Efisien
2	< 100 %	< 100	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat 11 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya efisien dan 16 indikator kinerja yang penggunaan anggarannya tidak efisien.

Dari 11 indikator kinerja yang efisien dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 116.195.417.744,-** atau terbilang (*Seratus Enam Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratur Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan dengan **capaian kinerja 133,97%** sedangkan realisasi anggaran 93,79 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,21 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.530.047.179,-**
2. Sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan dengan **capaian kinerja 235,07 %** sedangkan realisasi anggaran 93,88 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,12 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 738.863.201,-**
3. Sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian dengan **capaian kinerja 138,10 %** sedangkan realisasi anggaran 85,87 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 14,29 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 138.250.459,-**
4. Sasaran Meningkatnya kemandirian Fiskal dengan indicator Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD dengan **capaian kinerja 103,85 %** sedangkan realisasi anggaran 86,71 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 13,29 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.011.317.005,-**
5. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan dengan **capaian kinerja 100,00 %** sedangkan realisasi anggaran 94,99 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 5,01 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 13.517.518.668,-**

6. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi dengan **capaian kinerja 100,00 %** sedangkan realisasi anggaran 93,12 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 6,88 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 233.597.432,-**
 7. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indicator Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps dengan **capaian kinerja 140,00 %** sedangkan realisasi anggaran 99,11 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 0,89 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 68.370.519,-**
 8. Sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indicator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan **capaian kinerja 100,37 %** sedangkan realisasi anggaran 62,53 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 37,47 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 94.777.081.481,-**
 9. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator Angka Kematian Ibu dengan **capaian kinerja 123,81 %** sedangkan realisasi anggaran 90,72 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 9,28 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 2.366.127.559,-**
 10. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indicator Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan dengan **capaian kinerja 100 %** sedangkan realisasi anggaran 66,62 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 9,28 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 1.177.578.457,-**
 11. Sasaran Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dengan indicator Indeks kualitas lingkungan hidup dengan **capaian kinerja 110,02 %** sedangkan realisasi anggaran 91,68 % sehingga dapat dihitung jumlah efisiensi anggaran adalah 8,32 % dari pagu anggaran yaitu sebesar **Rp. 636.665.784,-**
- f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Pembagian alokasi anggaran disesuaikan dengan sasaran kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Secara keseluruhan Total Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 943.413.460.009,- , sedangkan realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 804.570.745.952,- atau mencapai 85,28 %.

Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Tabel 2.3.6
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya produksi sub sector pertanian peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sector pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	1 Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	886.233.900	868.366.451	97,98
			2 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	10.876.501.250	10.127.156.356	93,11
			3 Program Pengembangan Perkebunan	5.563.639.639	5.485.639.900	98,60
			4 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.799.142.000	2.743.730.927	98,02
			5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	490.510.000	441.556.175	90,02
			6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	643.000.000	638.917.326	99,37
			7 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	2.895.086.506	2.331.550.506	80,53
			8 Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	366.761.854	354.360.329	96,62
			9 Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	117.791.900	117.341.900	99,62
TOTAL				24.638.667.049	23.108.619.870	93,79
2	Meningkatnya produksi sub sector perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sector perikanan	1 Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	716.546.600	692.391.700	96,63
			2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	4.453.012.588	4.059.214.979	91,16
			3 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil	1.497.498.368	1.437.610.994	96,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
				Perikanan			
			4	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	635.278.995	629.802.750	99,14
			5	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	611.390.800	553.688.021	90,56
			6	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	1.842.273.700	1.739.496.908	94,42
			7	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	2.313.012.500	2.217.944.998	95,89
TOTAL					12.069.013.551	11.330.150.350	93,88
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (tamu asing dan Indonesia)	1	Program Pelestarian Budaya	236.991.039	236.989.039	100,00
TOTAL					236.991.039	236.989.039	100,00
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	16.590.900	16.590.900	100,00
			3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	114.536.955	105.211.325	91,86
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisata	38.807.000	38.807.000	100,00
TOTAL					169.934.855	160.609.225	94,51
4	Meningkatnya produksi sector pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sector pertambangan dan penggalan	1	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	305.216.530	262.153.737	85,89
			2	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	279.527.150	233.876.772	83,67

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	160.132.150	158.149.012	98,76
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	233.725.500	186.171.350	79,65
TOTAL					978.601.330	840.350.871	85,87
5	Meningkatnya sector perindustrian	Persentase pertumbuhan sector industry pengolahan	1	Program Pengembang Wilayah dan Pengawasan Industri	99.576.274	94.057.074	94,46
			2	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	4.095.327.241	3.734.793.175	91,20
			3	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	215.668.900	215.473.899	99,91
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	2.610.790.000	2.156.462.547	82,60
TOTAL					7.021.362.415	6.200.786.695	88,31
6	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio pendapatan asli Daerah terhadap APBD	1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	7.339.554.357	6.399.180.116	87,19
			2	Program Peningkatan Tata Kelolah Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	269.594.734	198.651.970	73,69
TOTAL					7.609.149.091	6.597.832.086	86,71
7	Menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	1	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerjaan, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	637.571.700	606.368.830	95,11
			2	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	72.320.700	69.959.200	96,73

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	25.268.615	25.268.615	100,00
			4	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	1.926.055.000	1.788.696.975	92,87
			5	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	184.999.100	178.816.900	96,66
			6	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	152.835.000	152.834.800	100,00
			7	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	4.980.986.010	4.440.967.870	89,16
			8	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3.468.411.160	2.792.733.625	80,52
			9	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	1.507.146.480	1.435.851.300	95,27
			10	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	84.212.380	84.212.380	100,00
			11	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	35.037.060	35.037.060	100,00
			12	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	175.047.030	168.341.480	96,17
			13	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	440.744.894	427.695.295	97,04
TOTAL					13.690.635.129	12.206.784.330	89,16
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk	1	Program Pemberdayaan	540.757.500	486.158.447	89,90

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran		Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		miskin		Sosial			
			2	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	1.019.440.800	968.751.405	95,03
			3	Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	1.443.055.500	1.257.556.150	87,15
			4	Program Rehabilitasi Sosial	584.538.500	567.290.400	97,05
			5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.051.299.000	931.388.900	88,59
			6	Program Penanganan Fakir Miskin	774.412.150	705.476.550	91,10
			7	Program Pengembangan Perdagangan	670.057.998	473.550.148	70,67
TOTAL					6.083.561.448	5.390.172.000	88,60
9	Menurunnya inflasi	Angka inflasi	1	Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	566.448.000	552.422.425	97,52
TOTAL					566.448.000	552.422.425	97,52
10	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil	338.900.800	335.979.950	99,14
			2	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	227.163.100	203.580.931	89,62
TOTAL					566.063.900	539.560.881	95,32
11	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan		Program Kebinamargaan	264.909.216.193	251.645.005.131	94,99
				Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	4.729.090.321	4.475.782.715	94,64
TOTAL					269.638.306.514	256.120.787.846	94,99
		Persentase kabupatn/kota yang telah terkoneksi		Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	2.410.029.500	2.377.759.148	98,66
				Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan	986.345.571	785.018.491	79,59

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL				3.396.375.071	3.162.777.639	93,12
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	7.719.104.078	7.650.733.559	99,11
TOTAL				7.719.104.078	7.650.733.559	99,11
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah laki-laki, angka harapan lama sekolah perempuan)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	27.949.566.700	26.981.245.840	96,54
TOTAL				27.949.566.700	26.981.245.840	96,54
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	44.176.791.100	39.892.697.723	90,30
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	5.929.258.000	5.467.202.663	92,21
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	7.429.220.000	3.844.425.278	51,75
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	91.204.122.829	13.757.764.495	15,08
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	32.709.689.266	29.383.554.751	89,83
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	14.233.719.524	13.253.725.406	93,11
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	33.009.283.978	30.385.040.533	92,05
			Program Pelayanan Pendidikan Wilayah	24.231.371.504	22.161.963.871	91,46

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Belitung dan Belitung Timur			
TOTAL				252.923.456.201	158.146.374.720	62,53
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Program Kesehatan Masyarakat	4.829.206.995	2.979.058.411	61,69
TOTAL				4.829.206.995	2.979.058.411	
		Angka kematian Ibu	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	25.509.569.195	23.143.441.636	90,72
TOTAL				25.509.569.195	23.143.441.636	
		Angka kematian Bayi	Program Pelayanan Kesehatan	29.147.452.750	24.982.795.426	85,71
TOTAL				29.147.452.750	24.982.795.426	85,71
		Angka Stunting	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	2.102.491.250	1.925.885.127	91,60
			Program Pelayanan Teknis Laboratuim Kesehatan	5.050.043.252	4.185.046.717	82,87
			Program Pelayanan Teknis Keperawatan	809.093.695	624.497.677	77,18
			Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	11.169.690.073	10.232.973.052	91,61
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	72.229.330.772	73.298.490.306	101,48
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	22.500.000.000	22.240.470.473	98,85
			Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	7.762.287.716	6.957.078.055	89,63
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	2.517.147.058	2.474.631.638	98,31
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	13.543.000.000	10.432.529.292	77,03
TOTAL				137.683.083.816	132.371.602.337	96,14

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	1.955.433.199	1.339.804.697	68,52
			Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	423.730.170	360.746.000	85,14
			Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	1.035.942.500	630.971.715	60,91
			Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan	112.220.000	18.225.000	16,24
TOTAL				3.527.325.869	2.349.747.412	66,62
		Indeks RB	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	1.442.939.629	1.399.061.557	96,96
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	24.800.600	24.800.600	100,00
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	18.856.000	18.856.000	100,00
			Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	60.356.800	60.356.800	100,00
			Program Penelitian dan Pengembangan	71.915.385	71.915.385	100,00
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	242.760.000	223.874.305	92,22
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	3.317.610.794	3.203.004.700	96,55
			Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20.750.000	18.255.000	87,98
			Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk	60.655.511.680	56.453.342.470	93,07

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Hukum Perundang-Undangan			
			Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggan, Kehumasan dan Protokoler Dewan	6.675.954.154	6.317.110.877	94,62
TOTAL				72.531.455.042	67.790.577.694	93,46
15	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	65.326.780	63.012.880	96,46
TOTAL				65.326.780	63.012.880	96,46
16	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	899.937.412	854.312.860	94,93
TOTAL				899.937.412	854.312.860	94,93
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Program Pembinaan Politik dalam Negeri	368.475.000	345.205.788	93,68
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	102.088.261	102.088.261	100,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	167.047.520	107.437.448	64,32
			Program Penegakan Perda dan Perkada	277.127.440	218.272.600	78,76
			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.378.616.200	2.136.090.136	89,80
TOTAL				3.293.354.421	2.909.094.233	88,33
18	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1.354.469.800	1.267.465.480	93,58
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	15.062.568.800	14.009.271.084	93,01
			Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan	6.599.412.760	5.469.230.846	82,87

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Yang Mendukung Kinerja Sasaran	Anggaran Program	Realisasi Anggaran Program	Persentase Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bencana			
TOTAL				23.016.451.360	20.745.967.410	90,14
19	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	138.961.663	138.544.063	99,70
			Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	160.330.650	157.550.000	98,27
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	148.547.818	148.547.818	100,00
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	1.734.279.050	1.702.430.473	98,16
			Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	195.433.997	183.745.697	94,02
			Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.862.509.900	1.854.752.689	99,58
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	1.087.430.900	846.878.851	77,88
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	2.325.566.020	2.122.488.686	91,27
TOTAL				7.653.059.998	7.016.394.214	91,68

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian kinerja anggaran. Setelah dilakukan penghitungan, maka akan diketahui efektif atau tidaknya alokasi anggaran terhadap tercapainya target sasaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan mendapatkan strategi yang tepat untuk menghindari kegagalan dalam pencapaian target kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat efektifitas dapat menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.3.7
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2019

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat efektif
2	90 % sampai 100%	Efektif
3	75 % s.d < 90 %	Cukup efektif
4	Kurang dari 50%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 27 indikator sasaran kinerja terdapat 9 indikator kinerja yang capaiannya sangat efektif, 12 indikator kinerja yang capaiannya efektif, 3 indikator kinerja yang capaiannya cukup efektif dan 2 indikator kinerja yang capaiannya tidak efektif. Efektifitas penggunaan anggaran dapat dirinci sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah untuk Indikator Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan jumlah anggaran sebesar Rp. 269.638.306.514,- dapat direalisasikan mencapai 94,99 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 100 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
2. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) jumlah anggaran sebesar Rp. 252.923.456.201,- dapat direalisasikan mencapai 62,53 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 100,37 % sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
3. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka Stunting jumlah anggaran sebesar Rp. 137.683.083.816,- dapat direalisasikan mencapai 96,14 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 40,42 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dikategorikan **tidak efektif** .
4. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk Indikator Indeks RB jumlah anggaran sebesar Rp. 72.531.455.042,- dapat direalisasikan mencapai 93,46 % dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,15 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
5. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka Kematian Bayi jumlah anggaran sebesar Rp. 29.147.452.750,- dapat direalisasikan mencapai 85,71% dengan hasil capaian kerjanya sebesar 99,86

%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

6. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat untuk Indikator Angka harapan lama sekolah jumlah anggaran sebesar Rp. 27.949.566.700,- dapat direalisasikan mencapai 96,54 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 99,75 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
7. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk Indikator Angka kematian ibu jumlah anggaran sebesar Rp. 25.509.569.195,- dapat direalisasikan mencapai 90,72 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 123,81%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
8. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian untuk Indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.638.667.049,- dapat direalisasikan mencapai 93,79% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 133,97%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
9. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana untuk Indikator Indeks kapasitas bencana daerah jumlah anggaran sebesar Rp. 23.016.451.360,- dapat direalisasikan mencapai 90,14 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 96,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
10. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Pengangguran untuk indikator Persentase Angka Pengangguran jumlah anggaran sebesar Rp. 13.690.635.129,- dapat direalisasikan mencapai 89,16 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 96,86%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
11. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.069.013.551,- dapat direalisasikan mencapai 93,88 % dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 235,07 %, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
12. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps jumlah anggaran sebesar

Rp. 7.719.104.078,- dapat direalisasikan mencapai 99,11% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 140,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.

13. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup jumlah anggaran sebesar Rp. 7.653.059.998,- dapat direalisasikan mencapai 91,68% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 110,02%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
14. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kemandirian Fiskal untuk indikator Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD jumlah anggaran sebesar Rp. 7.609.149.091,- dapat direalisasikan mencapai 86,71% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 103,85%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
15. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi sektor perindustrian untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.021.362.415,- dapat direalisasikan mencapai 88,31% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 93,60%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
16. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya kemiskinan untuk indikator Persentase Angka Kemiskinan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.083.561.448,- dapat direalisasikan mencapai 88,60% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 78,51%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
17. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk indikator Angka harapan hidup jumlah anggaran sebesar Rp. 4.829.206.995,- dapat direalisasikan mencapai 61,69% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 99,92%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
18. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi jumlah anggaran sebesar Rp. 3.396.375.071,- dapat direalisasikan mencapai 93,12% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 100,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
19. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk indikator Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.527.325.869,- dapat direalisasikan mencapai 66,62% dengan hasil capaian

kinerjanya sebesar 100,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

20. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi untuk indikator Skor aspek lembaga demokrasi jumlah anggaran sebesar Rp. 3.293.354.421,- dapat direalisasikan mencapai 88,33% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 89,24%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
21. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi sektor pertambangan untuk indikator Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian jumlah anggaran sebesar Rp. 978.601.330,- dapat direalisasikan mencapai 85,87% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 138,10%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **sangat efektif**.
22. Alokasi anggaran pencapaian sasaran terpenuhinya hak-hak politik masyarakat untuk indikator Skor aspek hak-hak politik jumlah anggaran sebesar Rp. 899.937.412,- dapat direalisasikan mencapai 94,93% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 92,29%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.
23. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Menurunnya Inflasi untuk indikator Persentase Tingkat Inflasi jumlah anggaran sebesar Rp. 566.448.000,- dapat direalisasikan mencapai 97,52% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 27,00%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.
24. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk untuk indikator Persentase laju pertumbuhan Penduduk jumlah anggaran sebesar Rp. 566.063.900,- dapat direalisasikan mencapai 95,32% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 81,73%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
25. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik jumlah anggaran sebesar Rp. 236.991.039,- dapat direalisasikan mencapai 100,00% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 89,15%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **cukup efektif**.
26. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan Persentase peningkatan jumlah wisatawan jumlah anggaran sebesar Rp. 169.934.855,- dapat direalisasikan mencapai 94,51% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 50,00%,

sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **tidak efektif**.

27. Alokasi anggaran pencapaian sasaran Meningkatnya Aspek kebebasan sipil dengan indikator Skor aspek kebebasan sipil jumlah anggaran sebesar Rp. 65.326.780,- dapat direalisasikan mencapai 96,46% dengan hasil capaian kinerjanya sebesar 95,85%, sehingga pengalokasian anggaran untuk sasaran ini dapat dikategorikan **efektif**.

Adapun Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, dan Jasa Perkebunan.

Target sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 7,78 sehingga persentase capaian sebesar 246,98 atau tingkat capaian dikategorikan **sangat berhasil**.

Sektor pertanian menguat didorong oleh membaiknya kinerja perkebunan karet dan lada akibat kenaikan harga karet dan lada global. Harga rata-rata karet global mencapai USD1,92/kg. Tahun 2020 sektor pertanian dan perkebunan mulai naik sebesar 2,59 persen. Bisa dilihat dari harga komoditi sawit yang mulai naik pada kisaran Rp 1.500 hingga mendekati Rp 1.800. Begitupun harga lada saat ini mulai beranjak naik dan Pemerintah Provinsi juga mengembangkan komoditi lain seperti tanaman porang dan jahe merah.

Komoditas Pertanian dan kehutanan secara bertahap telah menggerus peran timah yang telah menjadi andalan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sejak 350 tahun silam. dengan kian besarnya peran komoditas lain, selain timah, mengindikasikan masyarakat Babel sudah kreatif dalam menggali potensi daerah.

Pemerintah berusaha mendukung melalui kebijakan yang kondusif, dan membangun jaringan pasar yang lebih kompetitif. Potensi Bangka Belitung sangat variatif dan rata-rata memiliki keunggulan.

Saat ini Babel telah mampu mengalokasikan 37 persen kebutuhan beras daerah dari produksi sendiri. Selain meningkatkan tanaman pangan, upaya lain, membenahi tata niaga dan sistem budidaya komoditas tradisional masyarakat Babel, lada dan karet yang dalam beberapa tahun terakhir harganya turun drastis hingga menjadi pukulan berat bagi petani. Selain itu komoditas lain yang bakal menjadi andalan, kelapa sawit yang kini sudah banyak dikembangkan masyarakat dan sejumlah perusahaan.

Terhadap kelapa sawit ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tengah merancang kebijakan untuk bisa ekspor langsung dari Babel, dan secara bertahap minta agar pengusaha bergerak ke hilir tidak sebatas hanya Crude Palm Oil atau CPO, minyak sawit kasar.

2. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan

Target sebesar 3,45 dengan realisasi sebesar 9,76, sehingga persentase capaian sebesar 282,89 atau tingkat capaian dikategorikan **sangat berhasil**. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

kinerja sektor perikanan juga membbaiki sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan budidaya udang vannamei di Bangka Belitung dan kinerja perikanan tangkap juga masih baik sejalan dengan kondisi cuaca yang mendukung.

BPS telah menempatkan Babel pada peringkat kedua sebagai provinsi terbaik dalam pertumbuhan ekonominya selama tahun 2020, setelah Provinsi Jambi. Dan pertumbuhan ekonomi Babel pada 2020, mencapai – 1,04 persen, sedangkan Jambi – 0,99 persen. Tentu ini memberikan harapan yang lebih cerah ke depan, di tengah kegalauan masyarakat pasca timah.

Sebagai provinsi kepulauan, Babel memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat potensi, terutama untuk perikanan budidaya yang belum tergarap optimal. Saat ini sektor perikanan ini, terutama udang yang memiliki pasar ekspor yang sangat luas, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah mengupayakan bisa ekspor langsung dari Babel dan langkah yang tengah dipersiapkan memperluas Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang dan membangun colfstorage berkapasitas besar.

Data dari BPS juga menyebutkan walaupun terkontraksi, namun tetap saja, Babel mengalami pertumbuhan ekonomi. Adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda memberikan dampak besar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tercermin dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 dan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha pertanian dan kehutanan.

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik

Target sebesar 217.345 dengan realisasi sebesar 223,951 sehingga persentase capaian sebesar 103,04 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Pengembangan Komponen Pariwisata meliputi Pengembangan 3A; Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas destinasi pariwisata prioritas di Kepulauan Bangka Belitung dan menghasilkan 5 poin rekomendasi untuk menciptakan ekosistem pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berkelanjutan.

Dengan berubahnya Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang semula Tanjung Kelayang dan sekitarnya menjadi DPP Bangka Belitung maka, harus diperkuat dengan :

- a. Peningkatan kualitas konektivitas yang menghubungkan Bangka dan Belitung.
- b. Perlunya kreativitas dalam memperkenalkan potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Perlunya ketegasan dari pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Perlunya meningkatkan kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap program-program Kepulauan Bangka Belitung sebagai DPP.
- e. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif mulai dari persiapan sampai pelaksanaan program program prioritas bagi seluruh stakeholder.

Pariwisata harus bangkit, sebagai salah satu sektor pemasukan daerah yang dapat diandalkan tentu harus ada andil yang jelas dari masyarakat untuk memajukan pariwisata di Bangka Belitung yang sempat stagnan dikarenakan Pandemi Covid-19.

Untuk menciptakan ekosistem pariwisata Kepulauan Bangka Belitung yang berkelanjutan perlu adanya kreativitas dalam memperkenalkan potensi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kepulauan Bangka Belitung yang sebenarnya sudah menjadi hal yang lazim di lakukan di era kekinian di seluruh dunia dimana teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi faktor pendorong untuk memajukan dunia kepariwisataan yang berkelanjutan di Kepulauan Bangka Belitung.

Kita berharap dengan majunya dunia kepariwisataan di Bangka Belitung akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan akan berdampak pada tingkat Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor Pariwisata sehingga bisa membuat masyarakat sejahtera, serta bisa menjadi salah satu sektor bisnis yang menjanjikan di masa yang akan datang dimana Bangka Belitung tidak sepenuhnya lagi bergantung pada sektor pertambangan timah.

4. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan

Target sebesar 0,04 dengan realisasi sebesar 0,02, sehingga persentase capaian sebesar 50,00 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil. Tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

Adapun yang menjadi hambatan yang menjadi penyebab target tidak tercapai yakni adanya Wabah COVID-19 yang telah memukul industri pariwisata dalam negeri. Adanya pembatasan sosial dan larangan kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan domestik telah menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik dan wisatawan

mancanegara untuk berkunjung ke tempat tujuan wisata di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada sector pariwisata.

5. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian Target sebesar 0,63 dengan realisasi sebesar -9,23, sehingga persentase capaian sebesar -1.500 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil.

Perbaikan ekonomi [Bangka Belitung](#) pada tahun 2020 didorong oleh membaiknya kinerja ekspor luar negeri yang tercatat tumbuh positif sebesar 4,28% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi dalam sebesar 42,33% (yoy). Hal ini ditopang oleh membaiknya ekspor timah yang tumbuh hingga 7,14% (yoy) seiring dengan membaiknya harga timah global. Rata-rata harga timah global pada triwulan ini menyentuh USD17.678/ton, meningkat 3,15% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan tajam hingga 24,96% (yoy).

Membaiknya sektor pertambangan didorong oleh adanya perbaikan harga timah global sehingga meningkatkan keyakinan pelaku usaha pertambangan.

6. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan Target sebesar 1,25 dengan realisasi sebesar -5,64, sehingga persentase capaian sebesar -451 atau tingkat capaian dikategorikan kurang berhasil.

kinerja industri pengolahan menurun karena menurunnya produksi industri logam dasar (timah) dan industri makanan dan minuman (industri Crude Palm Oil/CPO) sehingga menahan laju pertumbuhan lebih lanjut.

Kinerja industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan akan semakin [membaik](#) sejalan dengan adanya tren perbaikan harga CPO dan timah global sehingga dapat mendorong kinerja perdagangan ekspor luar negeri.

7. Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Target sebesar 0,26 dengan realisasi sebesar 0,27, sehingga persentase capaian sebesar 103,8 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 terealisasi tercatat sebesar Rp 686.034.305.236,63 (enam ratus delapan puluh enam miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima ribu dua ratus tiga puluh enam koma enam puluh tiga rupiah) dari target PAD sebesar Rp 748.055.044.035,47 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima puluh lima juta empat puluh empat ribu tiga puluh lima koma empat

puluh tujuh rupiah). Sedangkan target pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 2.555.339.034.450,47 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar 94,13 % atau terealisasi sebesar Rp 2.405.214.874.172,63 (dua triliun empat ratus lima miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua ribu koma enam puluh tiga rupiah).

8. Persentase Angka Pengangguran

Target sebesar 5,42 dengan realisasi sebesar 5,25, sehingga persentase capaian sebesar 103,23 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi Komponen dari dampak Covid-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja (working hour losses):

- a. Pengangguran
- b. Bukan Angkatan Kerja (BAK)
- c. Sementara tidak bekerja

Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (shorter hours) Dari total penduduk usia kerja sebanyak 1. 104. 219 orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 9,05 persen.

Pengangguran karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena Covid-19 pada periode Februari-Agustus 2020.

Agustus 2020 Kota Pangkalpinang mengalami dampak Covid tertinggi terhadap penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 26,91 persen, dan terendah adalah Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,64 persen.

9. Persentase Angka Kemiskinan

Target sebesar 5,77 dengan realisasi sebesar 4,89 sehingga persentase capaian sebesar 118 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah guna menekan angka kemiskinan. selama tahun 2010-2018, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kisaran 5-7 persen. Di tahun 2019 dan 2020, persentase penduduk miskin berhasil diturunkan dari 5,25 persen di tahun 2018 menjadi 4,62 persen di tahun 2019 dan turun lagi sehingga menjadi 4,50 persen di tahun 2020. Tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebesar 67,75 ribu jiwa atau 6,51 persen dari total penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 68,38 ribu jiwa atau 4,62 persen dari jumlah

penduduk. Sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sedikit meningkat menjadi 68,39 ribu jiwa, namun secara persentase mengalami penurunan, yaitu menjadi 4,53 persen dari jumlah penduduk.

Pada tahun 2020 meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, idealnya akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memperkecil peluang berada pada kondisi miskin.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka besar kemungkinan dapat keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Disamping itu, pendapatan penduduk yang bekerja di sektor formal lebih tinggi dari pendapatan penduduk yang bekerja di sektor informal, oleh sebab itu semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor formal maka peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 – September 2020 antara lain adalah:

- a. Pandemi Covid 19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.
- b. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rata-rata pengeluaran penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Penurunan pengeluaran pada daerah perkotaan menjadi Rp 708.552,- pada September 2020 dan untuk daerah perdesaan menjadi Rp 677.278,- pada September 2020.
- c. Penduduk usia kerja yang terdampak covid 19 sebanyak 99.991 orang atau 9,05 persen.

10. Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target sebesar 4 dengan realisasi sebesar 1,08, sehingga persentase capaian sebesar 370,37 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Selama tahun 2020 (Januari-Desember) inflasi adalah sebesar 1,08 persen, lebih kecil dari tahun 2019 (Januari-Desember) yang mengalami inflasi sebesar 2,62 persen. Dilihat dari besarnya andil inflasi selama tahun 2020, dari 11 kelompok pengeluaran, 9 kelompok pengeluaran memberikan andil inflasi dan 2 kelompok pengeluaran memberikan andil deflasi.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,4092 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0274persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,0169 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,1269 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0093 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,0072 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,1270 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,1739 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,2334 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,9390 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,1079 persen. Komoditas sebagai andil utama inflasi tahun 2020 di antaranya ikan kembung, ikan kerisi, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Sedangkan komoditas pemberi andil terbesar pada deflasi diantaranya angkutan udara, sawi hijau, biaya pulsa ponsel, dan udang basah.

11. Persentase laju pertumbuhan Penduduk

Target sebesar 2,08 dengan realisasi sebesar 1,70 sehingga persentase capaian sebesar 122,35 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Berdasarkan SP 2020, Jumlah Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung pada September 2020 adalah 1.455.678 Jiwa. Dalam 10 tahun terakhir meningkat sebanyak 232.382 Jiwa. Dengan luas daratan sebesar 16.424,14 km², maka kepadatan penduduk provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 88,63 jiwa per km² Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 1,70 persen.

Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kep. Bangka Belitung hasil SP 2020 sebanyak 749.548 orang atau 51,49% dari total jumlah penduduk di Bangka Belitung.

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia hasil SP 2020 sebanyak 706.130 orang atau 48,51 % dari total jumlah penduduk di Bangka Belitung.

12. Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan

Target sebesar 0,10 dengan realisasi sebesar 0,10 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan negara dan 850,99 km dengan status jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar sudah memiliki jalan yang berkondisi baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung.

Namun demikian, masih ada jalan yang memiliki kondisi rusak berat, yaitu sebesar 1,50 persen (21,75 km), dimana kondisi jalan yang mengalami kerusakan ada pada jalan dengan status jalan provinsi (21,51 km) yaitu jalan umum yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Selain itu, jalan negara yang menghubungkan jalan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional sepanjang 0,24 km juga mengalami kondisi rusak berat. Jika dilihat dari persentase, kondisi jalan pada tahun 2019 dengan kondisi jalan baik sebesar 78,37 persen (1.137,42 km), jalan sedang sebesar 16,46 persen (238,94 km), dan kondisi jalan rusak ringan 3,67 persen (53,30 km).

Kondisi jalan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu penunjang terhadap jumlah kendaraan roda empat dan roda dua. Kendaraan roda dua dan roda empat berfungsi sebagai mobilitas penumpang maupun barang dalam suatu daerah.

13. Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi

Target sebesar 11,43 dengan realisasi sebesar 11,43 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Proses mobilisasi yang lancar dapat menjadi salah satu sarana penunjang perekonomian suatu wilayah. Kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 tercatat sebesar 338.118 buah, angka ini mengalami peningkatan 2,32 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 330.452 buah. Sedangkan Bus/Mini Bus menjadi moda transportasi kendaraan roda empat pilihan terakhir dari enam jenis kendaraan yang digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 757, meningkat sebesar 8,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 tercatat sebesar 338.118 buah, angka ini mengalami peningkatan 2,32 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 330.452 buah. Sedangkan Bus/Mini Bus menjadi moda transportasi kendaraan roda empat pilihan terakhir dari enam jenis kendaraan yang digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 757, meningkat sebesar 8,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan memerlukan sarana dalam pendistribusian barang antar kabupaten. Kendaraan roda empat seperti Pick up dan Truk mempunyai andil besar dalam mobilitas barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masing-masing sebesar 18.799 buah dan 9.453 buah pada tahun 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang berbentuk kepulauan sehingga aktifitas perhubungan penduduk secara ekonomi maupun nonekonomi mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi pada lalu lintas perhubungan laut. Keberadaan pelabuhan sebagai prasarana perhubungan laut sangat menentukan kelancaran aktivitas transportasi ini. Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki pelabuhan di setiap kabupaten dan kota. Pelabuhan yang terbesar dan tersibuk adalah di Pangkalbalam yang terletak di Kota Pangkalpinang sedangkan pelabuhan yang terkecil adalah pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah.

14. Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps
Target sebesar 0,60 dengan realisasi sebesar 0,60 sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
Hasil Susenas mencatat, pada tahun 2019 sebanyak 45,85 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Persentase ini sebenarnya masih cukup kecil di tengah era globalisasi yang sudah merajalela.
Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk yang mengakses internet di daerah perkotaan jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat pengetahuan penduduk dan juga ketersediaan sarana yang ada. Seperti kita ketahui, tingkat pendidikan masyarakat di desa rata-rata lebih rendah dibanding dengan pendidikan masyarakat di kota. Selain itu terbatasnya jumlah jaringan komunikasi yang ada di perdesaan juga menjadi salah satu penyebab penduduk di daerah perdesaan masih kesulitan untuk mengakses internet.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka tidaklah mengherankan apabila dilihat menurut kabupaten/kota, penduduk yang paling banyak mengakses internet pada tahun 2019 adalah penduduk Kota Pangkalpinang sebesar 62,09 persen sedangkan yang paling sedikit mengakses internet adalah Kabupaten Bangka Selatan yang hanya sebesar 40,91 persen.
Secara umum, dalam kurun waktu 2017-2019 masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin mudah dalam mengakses internet dari tahun ke tahun. Ini ditunjukkan dengan peningkatan yang terjadi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, salah satunya semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh akses

internet sehingga masyarakat dapat mengakses beragam informasi yang akan menambah wawasan dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

15. Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)
Target sebesar 12,08 dengan realisasi sebesar 12,05 sehingga persentase capaian sebesar 99,75 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Secara rata-rata, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 1,41 persen per tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,32 persen per tahun. Pendidikan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Usaha yang lebih keras dan berkesinambungan mutlak diperlukan, mengingat rata-rata lama sekolah di Kepulauan Bangka Belitung masih di bawah angka nasional.

16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Target sebesar 8,03 dengan realisasi sebesar 8,06 sehingga persentase capaian sebesar 100,37 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Melihat kondisi rata-rata lama sekolah selama periode 2015-2019, ternyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat jauh untuk mencapai pendidikan dasar 12 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan program wajib belajar dua belas tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya disebabkan penduduk yang putus sekolah terutama di tingkat sekolah dasar dan banyak dari penduduk yang hanya mampu menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar terutama mereka yang berada di daerah perdesaan. Ini kemungkinan terjadi karena seorang anak lebih tertarik untuk bekerja agar mendapatkan uang.

Selain itu masyarakat masih belum merasa penting untuk menyukseskan program wajib belajar dua belas tahun. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu mencapai 9,80 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Pangkalpinang sudah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMA. Sementara itu, rata-rata lama sekolah terendah ada di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu 6,42 tahun atau hanya sampai tamat SD.

Jika dilihat menurut wilayah, pada daerah perdesaan masih sangat banyak penduduk yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat atau bahkan

tidak memiliki ijazah sama sekali. Pada tahun 2019, sebesar 28,37 persen penduduk perdesaan tidak memiliki ijazah dan 31,24 persen penduduk perdesaan hanya memiliki ijazah SD/ sederajat. Di daerah perkotaan, persentase penduduk yang hanya memiliki ijazah SD/ sederajat relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan yakni sebesar 22,27 persen, sedangkan sebesar 13,74 persen penduduk perkotaan tidak memiliki ijazah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di daerah perkotaan lebih baik dibanding penduduk perdesaan.

Pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi oleh pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

17. Angka harapan hidup

Target sebesar 70,7 dengan realisasi sebesar 72,59 sehingga persentase capaian sebesar 102,6 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

18. Angka kematian ibu

Target sebesar 21 dengan realisasi sebesar 26 sehingga persentase capaian sebesar 80,76 atau tingkat capaian dikategorikan cukup berhasil. Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 36 kasus tahun 2019 menjadi 26 kasus pada tahun 2020. Penyebab kematian ibu adalah 12 kasus (46,15%) karena hipertensi dalam kehamilan, 4 kasus (15,38%) karena perdarahan, karena infeksi 1 kasus (3,84%), 9 kasus (34,61%) karena penyebab lain-lain (emboli 3 kasus, syock cardiogenic, oedema paru, suspect cardio myopati, tumor otak, perdarahan gusi serta hepatitis dan ginjal).

Tempat kejadian kematian ibu terbanyak di Rumah Sakit sejumlah 20 kasus (76,92%), 1 kasus (3,84%) di puskesmas, 3 kasus (11,53%) di rumah, dan 2 kasus (7,69%) di perjalanan. Jika dilihat dari usia, kematian ibu terbanyak pada usia 20-34 tahun sejumlah 14 kasus (53,84%), usia lebih dari atau sama dengan 35 tahun sejumlah 10 kasus (38,46%) dan 2 kasus (7,69%) terjadi pada usia kurang dari 20 tahun. Kematian tertinggi terjadi pada masa nifas sejumlah 13 kasus (50%), masa hamil sejumlah 10 kasus (38,46%) dan saat bersalin sejumlah 3 kasus (11,53%).

Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 Angka Kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 137,33/100.000 kelahiran hidup (KH) menurun menjadi 99,96/100.000 KH pada tahun 2020. Berdasarkan jumlah, kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan menjadi 26/26.010 KH dari 36/26.213 KH tahun 2019 Kasus kematian ibu paling banyak terdapat di Kota Pangkalpinang sebanyak 6 kasus (23,07%) dari total kematian

ibu, dan kasus kematian ibu terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan masing-masing 2 kasus (7,62%) dari total kematian ibu.

Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) paling tinggi di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 189,84/100.000 KH dan terendah di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 56,71/100.000 KH.

Terjadinya kematian ibu ini diduga berhubungan dengan belum optimalnya kualitas ANC terpadu, deteksi faktor risiko ibu hamil dan kunjungan rumah ibu hamil risiko tinggi yang belum maksimal serta penanganan kegawatdaruratan maternal yang belum maksimal di unit pelayanan. Deteksi sedini mungkin faktor risiko maupun komplikasi selama kehamilan secara integrasi dengan program terkait antara program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi, imunisasi dan P2M (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) dan PTM (Penyakit Tidak Menular).

Belum optimalnya keterfungsian Puskesmas PONED dan RS PONEK di kabupaten/kota dengan total puskesmas mampu PONED 20 puskesmas (31,2%) dari 64 puskesmas. Untuk itu perlu dioptimalkan keterfungsian puskesmas PONED dan RS PONEK yang didukung dengan tenaga yang sudah dilatih serta ketersediaan alat dan sarana yang memadai. Audit Maternal Perinatal telah dilaksanakan di 7 kabupaten/kota tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik dari sisi kuantitas/ frekuensi maupun kualitas proses pelaksanaan termasuk keterfungsian tim pengkaji dan rekomendasi hasil belum ditindaklanjuti. Tim AMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru dibentuk tanggal 23 Desember 2020.

Upaya untuk mengurangi tingkat kematian ibu :

- ✓ Advokasi ke stakeholder terkait;
- ✓ Koordinasi lintas program dan lintas sector;
- ✓ Organisasi Profesi khususnya profesi kesehatan;
- ✓ Perguruan Tinggi;
- ✓ LSM dan mitra terkait lainnya;
- ✓ meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan;
- ✓ mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
- ✓ Audit Maternal Perinatal Terintegrasi dalam Surveilans Kematian Ibu dan optimalisasi penggunaan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN),
- ✓ mengoptimalkan peran dokter dalam ANC, pendampingan RS prioritas bagi kabupaten lokus.
- ✓ Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor serta penguatan

sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) juga diperlukan.

19. Angka Kematian Bayi

Target sebesar 7,16 dengan realisasi sebesar 7,15, sehingga persentase capaian sebesar 100,1 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Kematian bayi (0–12 bulan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 186 kasus (7,15/1000 KH) menurun dari tahun 2019 sejumlah 188 kasus (7,17/1000 KH). Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak terdapat di Kabupaten Belitung 46 kasus (14,39/1000 KH) atau 24,73% dari total kematian bayi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang 9 kasus (2,12/1000 KH atau 4,83% dari total kematian bayi). Tertinggi terjadi pada usia neonatal (0-28 hari) sebanyak 135 kasus (5,19/1000 KH atau 72,58%).

Penyebab medis kematian bayi antara lain karena BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital dan lain-lain. Penyebab kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR (54 kasus atau 40% dari total kematian neonatus). Kematian neonates karena BBLR paling banyak terdapat di Kabupaten Belitung (35,18% dari total kematian neonatus karena BBLR). Kemudian kematian neonatus yang disebabkan karena asfiksia (41 kasus atau 30,37% dari total kematian neonatus), kelainan kongenital (18 kasus atau 13,3% dari total kematian neonatus), sepsis (2 kasus atau 1,48% dari total kematian neonatus) lain-lain (20 kasus atau 14,81% dari total kematian neonatus).

Ada beberapa hal yang patut diduga menjadi penyebab kematian neonatus yaitu belum semua tenaga kesehatan di unit pelayanan polindes/poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap/non rawat inap kompeten dalam penanganan kasus-kasus utamanya kegawatdaruratan pada bayi baru lahir.

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan baik di unit pelayanan dasar maupun rujukan guna meningkatkan kompetensi mereka di tempat tugas;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana di beberapa unit pelayanan dalam menangani bayi baru lahir yang mengalami komplikasi;
- c. Advokasi ke stakeholder terkait;
- d. koordinasi lintas program dan lintas sektor; meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan;
- e. mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
- f. Audit Maternal Perinatal terintegrasi dalam SKI;

- g. optimalisasi penggunaan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN),
- h. Mengoptimalkan peran dokter dalam ANC,
- i. Pendampingan RS prioritas bagi kabupaten lokus,
- j. Optimalisasi penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan, dan usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun.
- k. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi; koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- l. Pembinaan kader;
- m. Meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi,
- n. Penundaan usia kehamilan.
- o. Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor (transportasi, listrik, air bersih, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat) serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola yang baik (good governance).

20. Angka Stunting

Target sebesar 24 dengan realisasi sebesar 9,7 sehingga persentase capaian sebesar 247,42 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 4.364 anak balita (4,15% dari sasaran anak balita yang ditimbang berjumlah 105.227) menurun dari tahun 2019 berjumlah 5.154 balita (6% dari sasaran anak balita yang ditimbang berjumlah 85.854) di bawah target kinerja tahun 2020. Jumlah kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tahun 2020 paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat (12.26% dari total provinsi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang (1,16%).

Penyebab secara langsung kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dipengaruhi tiga hal:

- ✓ Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang,
- ✓ Anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan
- ✓ anak menderita penyakit infeksi.

Balita dengan kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan. Kekurangan gizi (underweight) pada anak balita merupakan dampak dari berbagai macam penyebab, seperti sanitasi yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, transportasi, adat istiadat (sosial budaya), dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahannya pun harus

secara komprehensif. Perawatan anak balita dengan kekurangan gizi (underweight) dapat dilaksanakan di Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit setempat dengan Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, nutrisisionis/dietisien dan perawat.

Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi,
- b. Meningkatkan komitmen kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mengedukasi,
- c. Menggerakkan peran serta masyarakat sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar hidup penduduk sesuai siklus hidup, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),
- d. Pembinaan kader;
- e. meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi,
- f. penundaan usia kehamilan.

Secara terperinci Intervensi Gizi Spesifik yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan gizi bagi anak balita :
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita (BB/TB/PB),
 - 2) Konseling gizi bagi anak balita, Merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya, menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT.
- b. Pelayanan gizi remaja putri
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi remaja putri di sekolah (usia 12- 18 tahun) melalui pemberian tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu (52 tablet/tahun)
 - 2) Konseling gizi bagi remaja dan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS).
- c. Pelayanan gizi bagi ibu hamil
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil
 - 2) Pemberian tablet Fe minimal 90 tablet
 - 3) Konseling ibu hamil
 - 4) Kelas edukasi bagi ibu hamil Penanganan ibu hamil KEK melalui pemberian PMT.

Pada Tahun 2020 Bappenas telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/Kota yang menjadi target prioritas penurunan angka stunting dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 Lokus yaitu, Kabupaten Bangka, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

Dalam rangka untuk meningkatkan penanganan stunting di ketiga Kabupaten tersebut akan di upayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran program/kegiatan penanganan stunting

- b. Meningkatkan keterlibatan penanganan stunting dari non pemerintah melalui program dari CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.
- c. Meningkatkan inovasi daerah dalam proses penanganan stunting
- d. Pelaksanaan Bimtek tentang money penanganan stunting
- e. Meningkatkan intensitas kampanye cegah stunting di daerah

1. Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan

Target opini WTP dengan realisasi mendapat opini WTP, sehingga persentase capaian sebesar 100 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil. Keberhasilan tingkat capaian ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketiga penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapan yang cukup. BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau kelemahan sistem pengendalian internal serta permasalahan terkait dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut masih dalam kewajaran secara material dan signifikan yang tidak mengganggu.

Hal yang akan dilakukan kedepan adalah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan LKPD TA 2019 hal ini merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengakolasi anggaran daerah secara tertib, efisien, bertanggung jawab sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

2. Indeks RB

Target sebesar 67,41 dengan realisasi sebesar 66,84, sehingga persentase capaian sebesar 99,15 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat dari adanya berbagai perubahan seperti :

- a. Memberikan pelatihan kepada Agen Perubahan.
- b. Melakukan pelatihan penyusunan proses bisnis dan evaluasi terhadap SOP.
- c. Telah menyusun kebijakan mengenai besaran TPP berdasarkan kinerja.
- d. Sudah menyusun dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait WBS.

3. Skor aspek kebebasan sipil, Skor aspek hak-hak politik dan Skor aspek lembaga demokrasi
- Skor aspek kebebasan sipil
Target sebesar 87,82 dengan realisasi sebesar 84,12, sehingga persentase capaian sebesar 95,78 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil
 - Skor aspek hak-hak politik
Target sebesar 81,85 dengan realisasi sebesar 71,71, sehingga persentase capaian sebesar 87,61 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
 - Skor aspek lembaga demokrasi
Target sebesar 80,54 dengan realisasi sebesar 75,48 sehingga persentase capaian sebesar 93,71 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.

Tingkat Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum masih dalam kategori SEDANG. Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2019 sebesar 84,12; naik 3,17 poin dibanding 2018 dan masuk kategori baik. Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 sebesar 71,71; turun 1,85 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang. Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 sebesar 75,48; naik 11,72 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.

IDI 2019 dipengaruhi oleh berbagai situasi sosial politik, di antaranya: Terdapat perbaikan regulasi, kelembagaan, serta sistem pengawasan Pemilu serentak (pilpres dan pileg) 2019 sehingga lebih baik dibandingkan pemilu serentak 2014 :

- a. Bertambahnya kejadian demonstrasi yang bersifat kekerasan.
- b. Adanya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN.
- c. Bertambahnya jumlah keputusan hakim yang kontroversial.
- d. Transparansi anggaran yang semakin baik.

IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat karena adanya peningkatan pada aspek lembaga demokrasi dan kebebasan sipil. Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah, seperti meningkatnya persentase perda inisiatif dan rekomendasi DPRD, penyediaan informasi APBD dalam rangka transparansi anggaran, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial.

Peningkatan Aspek Kebebasan Sipil didukung oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah

demonstrasi yang bersifat kekerasan, di antara terkait pengusiran KIP dan PIP oleh nelayan serta persoalan lahan perkebunan.

4. Indeks kapasitas bencana daerah
Target sebesar 0,25 dengan realisasi sebesar 0,24 sehingga persentase capaian sebesar 96,00 atau tingkat capaian dikategorikan berhasil.
5. Indeks kualitas lingkungan hidup
Target sebesar 59,81 dengan realisasi sebesar 65,80 sehingga persentase capaian sebesar 110,02 atau tingkat capaian dikategorikan sangat berhasil.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan
 - a) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah.

3. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional;
- b. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
- c. Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil;
- d. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian seluas 1.000 Ha
- e. Terlaksananya irigasi perpompaan sebanyak 11 unit
- f. Terlaksananya irigasi perpipaan sebanyak 2 unit
- g. Terlaksananya optimasi lahan seluas 2.500 Ha
- h. Terlaksananya perluasan dan perlindungan lahan pertanian 4 provinsi
- i. Terlaksananya e-RDCK penerapan kartu tani sebanyak 7 database
- j. Terlaksananya kawasan ubi kayu 1.400 Ha
- k. Terlaksananya kawasan Padi 1.330 Ha
- l. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat seluas 3.567 Ha
- m. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 1.200 Ha
- n. Terlaksananya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2 unit
- o. Terlaksananya lokasi pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 2 lokasi
- p. Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan seluas 150 Ha
- q. Terlaksananya kawasan lada, pala dan cengkeh seluas 1.425 Ha
- r. Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen komoditas perkebunan sebanyak 5 Unit
- s. Terlaksananya kebun sumber benih tanaman komoditi perkebunan seluas 27 Ha
- t. Terlaksananya rekomendasi benih tanaman perkebunan sebanyak 3 rekomendasi
- u. Terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan sebanyak 1.520.000 batang
- v. Terlaksananya kawasan bawang merah seluas 20 Ha
- w. Terlaksananya kawasan aneka cabai seluas 200 Ha
- x. Terlaksananya kawasan durian seluas 100 Ha
- y. tersedianya sarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 3 unit
- z. tersedianya prasarana peningkatan nilai tambah hortikultra sebanyak 1 unit
- aa. Terlaksananya kegiatan hijau pakan ternak seluas 15 Ha
- bb. Terlaksananya Mutu dan keamanan pakan 67 sampel

- cc. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan 1.500 Dosis
- dd. Terlaksananya optimalisasi reproduksi sebanyak 1.944 Acceptor
- ee. terlaksananya pengembangan unggas dan aneka ternak sebanyak 1.500 ekor
- ff. terlaksananya pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH sebanyak 3 unit usaha
- gg. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk sebanyak 125 sampel
- hh. terlaksananya pengendalian pemotongan betina produktif di 1 lokasi
- ii. tersedianya sarana pengolahan pangan dan non pangan sebanyak 1 unit
- jj. terlaksananya Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebanyak 2 lokasi

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi
Tugas Pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.361.099.000,- dengan realisasi Rp. 56.460.380.214,- atau 98,42%.

3.1.1. Target Kinerja

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional dan Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	Rp. 6.912.819.000
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tingkat layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatkan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	Rp. 2.026.216.000

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang mandiri dan Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	Rp. 814.774.000

3) Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian 1.000 Ha 2. Irigasi perpompaan 11 unit 3. Irigasi perpipaan 2 unit 4. Optimasi lahan 2.500 Ha 5. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian 4 Provinsi 6. e-RDKK penerpan kartu tani 7 database 	Rp.15.837.520.000
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kawasan Ubi Kayu 1.400 Ha 2. Jumlah Kawasan Padi 1.330 Ha 	Rp.6.801.053.000

		<p>3. Luas Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat 3.567 Ha</p> <p>4. Luas areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat 1.200 Ha</p> <p>5. Jumlah Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2 unit</p> <p>6. Jumlah lokasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 2 lokasi</p>	
3	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	<p>1. Jumlah Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan 150 Ha</p> <p>2. Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh 1.425 Ha</p> <p>3. Sarana dan prasarana pasca panen komoditas perkebunan 5 unit</p> <p>4. Kebun sumber benih tanaman komoditi perkebunan 33 Ha</p>	Rp.19.550.976.000

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Rekomendasi benih tanaman perkebunan sebanyak 3 rekomendasi 6. Penyediaan Benih unggul tanaman perkebunan sebanyak 1.520.000 batang 	
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Bawang Merah 20 Ha 2. Kawasan Aneka Cabai 200 Ha 3. Kawasan Durian 100 Ha 4. Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura 3 unit 5. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura 3 unit 	Rp.3.324.404.000
5	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hijauan Pakan Ternak 15 Ha 2. Mutu dan keamanan pakan 40 sampel 3. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan 1.500 Dosis 4. Optimalisasi Reproduksi 1.800 Acceptor 5. Pengembangan unggas dan aneka 	Rp.2.093.337.000

		ternak 1.500 ekor 6. Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH 2 unit usaha 7. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk 50 sampel 8. Pengendalian Pemotongan Betina produktif 1 lokasi 9. Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan 1 unit 10. Kelembagaan dan Usaha Peternakan 2 lokasi	
--	--	--	--

3.1.2. Realisasi

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatkan kemantapan jalan nasional	Rp. 6.836.687.000
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatkan keterpaduan tata kelola	Rp. 1.987.740.000

		pengelolaan SDA	
--	--	-----------------	--

2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil	Rp. 802.485.800

3) Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian seluas 1.000 Ha 2. Terlaksananya irigasi perpompaan sebanyak 11 unit 3. Terlaksananya irigasi perpipaan sebanyak 2 unit 4. Terlaksananya optimasi lahan seluas 2.500 Ha 5. Terlaksananya perluasan dan perlindungan lahan pertanian 4 provinsi 6. Terlaksananya e-RDKK penerapan kartu tani sebanyak 7 database 	Rp.15.818.500.362
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kawasan ubi kayu 1.400 Ha 2. Terlaksananya kawasan Padi 1.330 Ha 3. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi 	Rp. 6.708.818.112

		<p>Bersertifikat seluas 3.567 Ha</p> <p>4. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 1.200 Ha</p> <p>5. Terlaksananya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2 unit</p> <p>6. Terlaksananya lokasi pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 2 lokasi</p>	
3	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	<p>1. Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan seluas 150 Ha</p> <p>2. Terlaksananya kawasan lada, pala dan cengkeh seluas 1.425 Ha</p> <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen komoditas perkebunan sebanyak 5 Unit</p> <p>4. Terlaksananya kebun sumber benih tanaman komoditi perkebunan seluas 27 Ha</p> <p>5. Terlaksananya rekomendasi benih tanaman perkebunan sebanyak 3 rekomendasi</p> <p>6. Terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan sebanyak</p>	Rp.19.207.605.144

		1.520.000 batang	
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kawasan bawang merah seluas 20 Ha 2. Terlaksananya kawasan aneka cabai seluas 200 Ha 3. Terlaksananya kawasan durian seluas 100 Ha 4. tersedianya sarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 3 unit 5. tersedianya prasarana peningkatan nilai tambah hortikultra sebanyak 1 unit 	Rp. 3.050.451.796
5	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan hijau pakan ternak seluas 15 Ha 2. Terlaksananya Mutu dan keamanan pakan 67 sampel 3. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan 1.500 Dosis 4. Terlaksananya optimalisasi reproduksi sebanyak 1.944 Acceptor 5. terlaksananya pengembangan unggas dan aneka ternak sebanyak 1.500 ekor 6. terlaksananya pemenuhan persyaratan 	Rp. 2.048.092.000

		<p>produk hewan yang ASUH sebanyak 3 unit usaha</p> <p>7. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk sebanyak 125 sampel</p> <p>8. terlaksananya pengendalian pemotongan betina produktif di 1 lokasi</p> <p>9. tersedianya sarana pengolahan pangan dan non pangan sebanyak 1 unit</p> <p>10. terlaksananya Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebanyak 2 lokasi</p>	
--	--	--	--

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.837.520.000,00	15.818.500.362,00	99,88	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian seluas 1.000 Ha 2. Terlaksananya irigasi perpompaan sebanyak 11 unit 3. Terlaksananya irigasi perpipaan sebanyak 2 unit 4. Terlaksananya optimasi lahan seluas 2.500 Ha 5. Terlaksananya perluasan dan perlindungan lahan pertanian 4 provinsi 	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									6. Terlaksananya e-RDKK penerapan kartu tani sebanyak 7 database		
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.733.000.000,00	2.731.430.000,00	99,94	Tersedianya Jaringan Irigasi Tersier, Irigasi Perpompaan, dan Irigasi Perpipaan	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Jaringan Irigasi Tersier								
			1. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	420.000.000,00	420.000.000,00	100	350 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	600.000.000,00	600.000.000,00	100	500 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	180.000.000,00	180.000.000,00	100	150 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Irigasi Perpompaaan								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	381.000.000,00	380.730.000,00	99,93	3 Unit	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	508.000.000,00	507.820.000,00	99,96	4 Unit	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	254.000.000,00	253.820.000,00	99,93	2 Unit	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95.000.000,00	94.640.000,00	99,62	1 Unit	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	95.000.000,00	94.640.000,00	99,62	1 Unit	100	APBN TH. 2020
			3. Output : Irigasi Perpipaan								
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	99.780.000,00	99,78	1 Unit	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1 Unit	100	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.265.950.000,00	11.253.790.700,00	99,89	Terlaksananya Optimalisasi Lahan dan Monitoring dan Evaluasi lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Optimalisasi Lahan								
			1. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Lahan Rawa	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.252.150.000,00	2.241.095.700,00	99,51	500 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Lahan Rawa	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.252.150.000,00	2.251.590.000,00	99,98	500 Ha	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Optimalisasi Lahan Rawa	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.509.500.000,00	4.509.260.000,00	99,99	1000 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Rincian Kegiatan : Optimasi Lahan Rawa	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.252.150.000,00	2.251.845.000,00	99,99	500 Ha	100	APBN TH. 2020
2.	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.801.053.000,00	6.708.818.112,00	98,64	1. Terlaksananya kawasan ubi kayu 1.400 Ha 2. Terlaksananya kawasan Padi 1.330 Ha 3. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat seluas 3.567 Ha 4. Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 1.200 Ha 5. Terlaksananya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Pangan 2 unit 6. Terlaksananya lokasi pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 2 lokasi		
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.908.850.000,00	1.908.674.000,00	99,99	Terlaksananya Penyaluran sarana produksi dan Koordinasi serta Bimtek pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Kawasan Ubi Kayu								
			1. Rincian Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	805.000.000,00	805.000.000,00	100,00	700 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	805.000.000,00	805.000.000,00	100,00	700 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	298.850.000,00	298.674.000,00	99,94	3 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.803.338.000,00	1.746.446.900,00	96,85	Terlaksananya Penyaluran sarana produksi dan Koordinasi serta Bimtek pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Kawasan Padi								
			1. Rincian Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	751.358.000,00	750.647.500,00	99,91	710 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi	893.730.000,00	837.930.000,00	93,76	150 Ha (Bangka Tengah) dan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Tengah dan Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung				470 Ha (Bangka Barat)		
			2. Output : Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi (Daerah)								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	158.250.000,00	157.869.400,00	99,76	5 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.698.670.000,00	1.697.772.730,00	99,95	Terlaksananya Bantuan Benih padi dan Jagung yang Bersertifikat serta berjalanya kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat								
			1. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	914.250.000,00	914.250.000,00	100,00	3657 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah)								
			1. Rincian Kegiatan : Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.700.000,00	66.920.000,00	98,85	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	41.520.000,00	41.402.730,00	99,72	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Dukungan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			3. Output : Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat								
			1. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	147.075.000,00	147.075.000,00	100,00	265 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	174.825.000,00	174.825.000,00	100,00	315 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	138.750.000,00	138.750.000,00	100,00	250 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.350.000,00	94.350.000,00	100,00	170 Ha	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	200 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	942.840.000,00	937.759.482,00	99,46	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								
			1. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.000.000,00	23.992.182,00	99,97	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	113.280.000,00	112.490.600,00	99,30	1 Layanan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Pengelolaan perbendaharaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	745.540.000,00	741.256.700,00	99,43	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.020.000,00	60.020.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			5. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	447.355.000,00	418.165.000,00	93,47	Terlaksananya Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan dan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan								
			1. Rincian Kegiatan : Penyaluran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	217.620.000,00	90,68	2 Unit	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengumpulan informasi akses pasar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.560.000,00	49.060.000,00	97,03	2 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			3. Output : Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat)								
			1. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.795.000,00	125.485.000,00	95,94	12 Provinsi	100	APBN TH. 2020
			1. Rincian Kegiatan : Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	12 Provinsi	100	APBN TH. 2020
3.	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19.550.976.000,00	19.207.605.144,00	98,24	1. Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									seluas150 Ha 2. Terlaksana nya kawasan lada, pala dan cengkeh seluas 1.425 Ha 3. Tersediany a sarana dan prasarana pasca panen komoditas perkebuna n sebanyak 5 Unit 4. Terlaksana nya kebun sumber benih tanaman komoditi perkebuna n seluas 27 Ha 5. Terlaksana nya rekomenda si benih tanaman perkebuna n sebanyak 3 rekomenda si		

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									6. Terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan sebanyak 1.520.000 batang		
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Perlindungan Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	319.420.000,00	318.981.000,00	99,86	Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Lada	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.400.000,00	88.400.000,00	100,00	50 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.400.000,00	88.400.000,00	100,00	50 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Pengendalian OPT Tanaman Karet	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.800.000,00	98.690.000,00	99,89	50 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Pengawasan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.750.000,00	10.720.000,00	99,72	50 Ha	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Pengawasan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Lada	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.250.000,00	25.181.000,00	99,73	50 Ha	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Pengawasan, Monev dan Pelaporan Pengendalian OPT Tanaman Karet di Kab.Bangka	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.820.000,00	7.590.000,00	97,06	50 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	352.870.000,00	352.770.000,00	99,97	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker								
			1. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	159.720.000,00	159.720.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Pengelolaan kepegawaian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	193.150.000,00	193.050.000,00	99,95	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			3. Kegiatan : Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.910.210.000,00	1.643.708.000,00	86,05	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah pada Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh								
			1. Rincian Kegiatan : Perluasan tanaman lada	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	273.000.000,00	219.900.000,00	80,55	150 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Perluasan tanaman lada	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	219.000.000,00	219.000.000,00	100,00	125 Ha	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Perluasan tanaman lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	364.000.000,00	293.200.000,00	80,55	200 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	76.000.000,00	57.493.000,00	75,65	100 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			5. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76.000.000,00	57.493.000,00	75,65	100 Ha	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	342.000.000,00	258.721.000,00	75,65	450 Ha	100	APBN TH. 2020
			7. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76.000.000,00	57.493.000,00	75,65	100 Ha	100	APBN TH. 2020
			8. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71.400.000,00	73.700.000,00	100,00	100 Ha	100	APBN TH. 2020
			9. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi tanaman lada	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106.000.000,00	103.700.000,00	97,83	100 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			10. Rincian Kegiatan : Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Provinsi (Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Belitung, Belitung Timur)	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	306.810.000,00	303.008.000,00	98,76	1 Laporan	100	APBN TH. 2020
			4. Kegiatan : Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.404.070.000,00	1.358.356.144,00	96,74	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan dan terlaksananya Penguatan Teknis Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengadaan alat pasca panen lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	330.940.000,00	319.929.125,00	96,67	1 Unit	100	APBN TH. 2021
			2. Rincian Kegiatan : Pengadaan alat pasca panen lada	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi	317.260.000,00	312.676.125,00	98,56	1 Unit	100	APBN TH. 2021

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kepulauan Bangka Belitung						
			3. Rincian Kegiatan : Pengadaan alat pasca panen lada	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	408.000.000,00	403.357.375,00	98,86	3 Unit	100	APBN TH. 2021
			2. Output : Penguatan Teknis Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Bimtek Sistem Jaminan Mutu	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.230.000,00	77.231.900,00	88,54	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Bimtek Sistem Jaminan Mutu	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37.780.000,00	37.780.000,00	100,00	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Bimtek Sistem Jaminan Mutu	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	161.900.000,00	146.781.619,00	90,66	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34.400.000,00	34.040.000,00	98,95	3 Lokasi	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			5. Rincian Kegiatan : Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.560.000,00	26.560.000,00	100,00	3 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			5. Kegiatan : Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15.564.406.000,00	15.533.790.000,00	99,80	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun Induk Lada Provinsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	114.020.000,00	114.020.000,00	100,00	4 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun Induk Lada Kab. Belitung	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33.965.000,00	32.655.000,00	96,14	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun Induk Lada Kab. Bangka	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.045.000,00	28.015.000,00	99,89	1 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Kab. Bangka Selatan tahun ke 2	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.725.000,00	29.725.000,00	100,00	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Kab. Belitung tahun ke 2	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32.165.000,00	30.699.000,00	95,44	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Kab. Belitung Timur tahun ke 2	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32.165.000,00	31.985.000,00	99,44	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			7. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Provinsi tahun ke 2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.305.000,00	29.735.000,00	98,12	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			8 Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Kab. Bangka Barat tahun ke 3	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104.020.000,00	103.720.000,00	99,71	2 Ha	100	APBN TH. 2020
			9. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun induk lada di Kab. Bangka Tengah tahun ke 3	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	104.520.000,00	104.520.000,00	100,00	2 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			10. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan BPT dan PIT Tanaman Lada Kab. Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	260.767.000,00	249.100.000,00	95,53	9 Ha	100	APBN TH. 2020
			11. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan BPT dan PIT Tanaman Lada Kab. Bangka Barat	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	156.870.000,00	156.625.000,00	99,84	6 Ha	100	APBN TH. 2020
			12. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan BPT dan PIT Tanaman Lada Kab. Bangka	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87.428.000,00	87.240.000,00	99,78	3 Ha	100	APBN TH. 2020
			13. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Kebun Entres Karet yang telah ditetapkan di Kab. Bangka Tengah,	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.576.000,00	7.576.000,00	100,00	1 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam Komoditi Perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.429.000,00	31.669.000,00	78,33	3 Rekomendasi	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Output : Penguatan Teknis Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan								
			1. Rincian Kegiatan : Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	26.310.000,00	21.570.000,00	81,98	35 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha produksi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29.316.000,00	29.316.000,00	100,00	2 Bulan	100	APBN TH. 2020
			4. Output : Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah								
			1. Rincian Kegiatan : Penyediaan benih perluasan tanaman lada Benih Lada dalam Polibag	Kabupaten Bangka Barat, Belitung dan Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.213.400.000,00	7.213.400.000,00	100,00	760.000 BTG	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Penyediaan benih rehabilitasi tanaman lada Benih Lada dalam Polibag	Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka, Belitung, dan Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.214.000.000,00	7.213.200.000,00	99,99	760.000 BTG	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Pengawasan Penyediaan Benih	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	19.380.000,00	19.020.000,00	98,14	760.000 BTG	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Unggul Tanaman Perkebunan		Bangka Belitung						
4.	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.324.404.000,00	3.050.451.796,00	91,76	1. Terlaksananya kawasan bawang merah seluas 20 Ha 2. Terlaksananya kawasan aneka cabai seluas 200 Ha 3. Terlaksananya kawasan durian seluas 100 Ha 4. tersedianya sarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 3 unit 5. tersedianya prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 1 unit	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.480.000.000,00	1.468.548.480,00	99,23	Meningkatnya Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pada kawasan bawang merah dan cabai	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Kawasan Bawang Merah								
			1. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.240.000,00	6.240.000,00	100,00	20 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.796.000,00	8.760.000,00	99,59	20 Ha	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	551.644.000,00	551.643.080,00	100,00	20 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.920.000,00	10.920.000,00	100,00	20 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			5. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	20 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Kawasan Aneka Cabai								
			1. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	22.650.000,00	22.577.900,00	99,68	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.010.000,00	24.010.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.010.000,00	24.010.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25.510.000,00	25.510.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.010.000,00	24.010.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			6. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17.230.000,00	12.416.000,00	72,06	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			7. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Pangkalpinang	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			8. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48.830.000,00	48.495.000,00	99,31	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			9. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	87.875.000,00	97,64	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			10. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			11. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	88.202.000,00	98,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			12. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			13. Rincian Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			14. Rincian Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.000.000,00	87.875.000,00	97,64	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			15. Rincian Kegiatan : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi	Pangkalpinang	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			16. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.410.000,00	9.410.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			17. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			18. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			19. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			20. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			21. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			22. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pangkalpinang	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			23. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38.340.000,00	38.194.500,00	99,62	25 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.000.000,00	239.797.729,00	99,92	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.450.000,00	12.450.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Pangkalpinang	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			7. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			8. Rincian Kegiatan : Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			9. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	113.050.000,00	112.847.729,00	99,82	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			10. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			11. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Bangka	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			12. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			13. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Bangka Selatan	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			14. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Pangkalpinang	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			15. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Belitung Timur	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			16. Rincian Kegiatan : Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	1 Layanan	100	APBN TH. 2020
			3. Kegiatan : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	800.000.000,00	798.830.600,00	99,85	Meningkatnya Produksi Buah dan Florikultura pada Kawasan Durian	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Kawasan Durian								
			1. Rincian Kegiatan : Identifikasi/Koordinasi /Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52.880.000,00	52.880.000,00	100,00	2 Kelompok	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	701.600.000,00	700.623.600,00	99,86	2 Kelompok	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			3. Rincian Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Kabupaten Bangka Barat	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45.520.000,00	45.327.000,00	99,58	150 Ha	100	APBN TH. 2020
			4. Kegiatan : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	804.404.000,00	543.274.987,00	67,54	Meningkatnya n Nilai Tambah Hortikultura	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura								
			1. Rincian Kegiatan : Sarana pascapanen Hortikultura	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	7 Unit	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Sarana pemasaran hortikultura	Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	226.404.000,00	225.574.987,00	99,63	7 Unit	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura								
			1. Rincian Kegiatan : Prasarana pascapanen produk hortikultura	Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	240.000.000,00	229.700.000,00	95,71	7 Unit	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			2. Rincian Kegiatan : Prasarana pengolahan produk hortikultura	Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	260.000.000,00	10.000.000,00	3,85	7 Unit	100	APBN TH. 2020
5.	Kementerian Pertanian	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.093.337.000,00	2.048.092.000,00	97,84	1. Terlaksananya kegiatan hijau pakan ternak seluas 15 Ha 2. Terlaksananya Mutu dan keamanan pakan 67 sampel 3. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan 1.500 Dosis 4. Terlaksananya optimalisasi reproduksi	98	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									sebanyak 1.944 Acceptor 5. terlaksananya pengembangan unggas dan aneka ternak sebanyak 1.500 ekor 6. terlaksananya pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH sebanyak 3 unit usaha 7. Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk sebanyak 125 sampel 8. terlaksananya pengendali		

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									an pemotongan betina produktif di 1 lokasi 9. tersedianya sarana pengolahan pangan dan non pangan sebanyak 1 unit 10. terselaksananya Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebanyak 2 lokasi		
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	660.000.000,00	649.911.000,00	98,47	Terlaksananya layanan pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pakan, produksi hijauan pakan, serta produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan	99,17	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Hijauan Pakan Ternak								
			1. Rincian Kegiatan : Hijauan Pakan Ternak Berkualitas (Pengolahan Lahan dan Penanaman)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	585.200.000,00	577.884.000,00	98,75	15 Ha	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Hijauan Pakan Ternak Berkualitas (Administrasi dan Operasional Kegiatan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	1 Laporan	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Mutu dan Keamanan Pakan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (Persiapan Kegiatan dan Koordinasi)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8.190.000,00	7.250.000,00	88,52	1 Kegiatan	95	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan :Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (Pengambilan dan pengiriman sampel)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28.600.000,00	27.807.000,00	97,23	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan(Pengawasan Peredaran Pakan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	21.960.000,00	20.920.000,00	95,26	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (Evaluasi dan Pelaporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	1 Laporanann	100	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42.120.000,00	31.115.000,00	74,85	Terlaksananya Proses Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	95	APBN TH. 2021
			1. Output : Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	41.570.000,00	31.115.000,00	74,85	1500 Ekor	95	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Pemetaan dan Pelaporan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	550.000,00	-	-	1 Laporan	95	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Kegiatan : Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	600.135.000,00	560.400.000,00	93,38	Terlaksananya Optimalisasi Reproduksi dan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	97,78	APBN TH. 2021
			1. Output : Optimalisasi Reproduksi								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Alat dan Bahan IB	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35.574.000,00	35.574.000,00	100,00	1 Unit	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pengadaan N2 Cair	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.110.000,00	92.110.000,00	100,00	3000 Liter	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Operasional IB	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31.920.000,00	31.320.000,00	98,12	1064 Ekseptor	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Pemeriksaan Kebuntingan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27.720.000,00	27.000.000,00	97,40	924 Ekor	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Pelaporan Kelahiran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	27.080.000,00	19.680.000,00	72,67	1354 Ekor	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			6. Rincian Kegiatan : Koordinasi, Pendampingan dan Pengawasan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	177.621.000,00	157.570.000,00	88,71	3 Laporan	90	APBN TH. 2020
			7. Rincian Kegiatan : Honor Rekorder	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.073.000,00	83.793.000,00	89,07	12 Bulan	95	APBN TH. 2020
			2. Output : Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak								
			1. Rincian Kegiatan : Pengadaan Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	107.062.000,00	106.775.000,00	99,73	1500 Ekor	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan :Operasional dan Administrasi Kegiatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.975.000,00	6.578.000,00	94,31	1 Kegiatan	95	APBN TH. 2020
			4. Kegiatan : Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	145.050.000,00	116.117.000,00	80,05	Terlaksananya Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH serta Pengawasan Mutu dan	99	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									Keamanan Produk		
			1. Output : Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH								
			1. Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet (Pembinaan NKV pada Unit Usaha)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18.050.000,00	7.769.000,00	43,04	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan :Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet (Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesmavet)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.000.000,00	5.968.000,00	99,47	2 Kegiatan	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan :Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet (Pengembangan Sistem dan Pemutakhiran Data Kesmavet)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31.000.000,00	26.200.000,00	84,52	3 Kegiatan	95	APBN TH. 2020
			2. Output : Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk								
			1. Rincian Kegiatan : Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	40.000.000,00	39.532.000,00	98,83	50 Sampel	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			3. Output : Pengendalian Pemotongan Betina Produktif								
			1. Rincian Kegiatan : Pengawasan Pemotongan Betina Produktif	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	36.648.000,00	73,30	1 Lokasi	100	APBN TH. 2020
			5. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	324.032.000,00	297.638.000,00	91,85	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	97	APBN TH. 2020
			1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								
			1. Rincian Kegiatan : Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90.080.000,00	88.838.000,00	98,62	1 Kegiatan	99	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60.009.000,00	56.009.000,00	93,33	4 Kegiatan	99	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan	106.723.000,00	92.283.000,00	86,47	1 Layanan	95	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Bangka Belitung						
			4. Rincian Kegiatan :Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	67.220.000,00	60.508.000,00	90,01	2 Kegiatan	95	APBN TH. 2020
			6. Kegiatan : Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	322.000.000,00	291.133.000,00	90,41	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan serta Kelembagaan dan Usaha Peternakan	99	APBN TH. 2020
			1. Output : Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik (Pengadaan Alat Pengolahan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.000.000,00	97.680.000,00	99,67	1 Paket	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik (Operasional Kegiatan dan Administrasi Kegiatan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102.000.000,00	76.944.000,00	75,44	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Kelembagaan dan Usaha Peternakan								
			1. Rincian Kegiatan : Pengolahan Hasil Peternakan (Pemutakhiran Database Pengolahan)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30.000.000,00	29.444.000,00	98,15	1 Kegiatan	99	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pemasaran Hasil Peternakan (Pengembangan Informasi Pasar)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80.960.000,00	76.180.000,00	94,10	10 Laporan	97	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Pemasaran Hasil Peternakan (Perhitungan Penyediaan Daging Sapi/Kerbau)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.040.000,00	10.885.000,00	98,60	1 Kegiatan	100	APBN TH. 2020
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.912.819.000,00	6.836.687.000,00	98,90	Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatnya kemantapan jalan nasional	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.912.819.000,00	6.836.687.000,00	98,90	Terlaksananya Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, Penanganan Drainase, dan Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan, serta Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Pangkalpinang-Namang	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	995.848.000,00	994.663.000,00	99,88	34.77 Km	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Dalam Kota Pangkalpinang-Namang	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	877.593.000,00	863.702.000,00	98,42	34.77 Km	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Output : Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan								
			1. Rincian Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Pulau Pelepas	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	996.164.000,00	996.164.000,00	100,00	0.36 Km	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	183.421.000,00	176.854.000,00	96,42	3720 Meter	100	APBN TH. 2020
			3. Output : Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan								
			1. Rincian Kegiatan : Penanganan Drainase dan Bangunan Pelengkap Jalan	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	800.000.000,00	793.880.000,00	99,24	39 Meter	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Revitalisasi Saluran Draenase Secara Padat Karya Ruas Jalan Bts Kota Pangkalpinang-Namang;Dalam Kota Pangkalpinang	Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.131.653.000,00	2.100.553.000,00	98,54	8.2 Km	100	APBN TH. 2020
			4. Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker								
			1. Rincian Kegiatan : Sistem Pelaporan Elektronik Kementerian PU	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35.437.000,00	32.966.000,00	93,03	1 Dokumen	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	152.867.000,00	146.357.000,00	95,74	1 Dokumen	100	APBN TH. 2020
			3. Rincian Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.655.000,00	2.870.000,00	78,52	1 Dokumen	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Rincian Krgiatan Administrasi Kegiatan	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	386.809.000,00	384.716.000,00	99,46	1 Dokumen	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Kebutuhan Pencegahan Covid - 19	Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	93.939.000,00	89.920.000,00	95,72	3 Bulan	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Pengadaan Resin Untuk Marka Kuning	Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55.433.000,00	55.433.000,00	100,00	28.8 Km	100	APBN TH. 2020
			7. Rincian Kegiatan : Pengadaan Bahan Tambalan Cepat Mantap (TCM) PPK 3.1	Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200.000.000,00	198.609.000,00	99,30	74 Ton	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.026.216.000,00	1.987.740.000,00	98,10	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA	100	APBN TH. 2020
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.026.216.000,00	1.987.740.000,00	98,10	Terlaksananya Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara serta Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1. Rincian Kegiatan : Operasi Rutin D.I Rias;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung;42 km;3100 Hektar;F;S;SYC	Kab, Bangka Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	260.075.000,00	259.550.000,00	99,80	42 Km	100	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Operasi Rutin D.I Selingsing;Kab. Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung;38km;4318 Hektar;F;S;SYC	Kab. Belitung Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	276.185.000,00	244.090.000,00	88,38	38 Km	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Saluran Pembuang Sekunder D.I Selingsing;Kab. Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung;4 km;300 Hektar;F;K;SYC	Kab. Belitung Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	129.248.000,00	129.248.000,00	100,00	43 Km	100	APBN TH. 2020
			4. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Jar. Irigasi Wil. Air Pairem-Meeting I D.I Rias;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung;0.475 km;36 Hektar;F;K;SYC	Kab, Bangka Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	163.205.000,00	163.205.000,00	100,00	0.475 Km	100	APBN TH. 2020
			5. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Saluran Primer Temayang- Kubur Lama D.I Rias;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung;0.9 km;100 Hektar;F;K;SYC	Kab, Bangka Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.770.000,00	94.770.000,00	100,00	0.9 Km	100	APBN TH. 2020
			6. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing;Kab. Belitung Timur;Kepulauan Bangka Belitung;38 km;4318 Hektar;F;S;SYC	Kab. Belitung Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	372.049.000,00	371.488.000,00	99,85	38 Km	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			7. Rincian Kegiatan : Pemeliharaan Rutin D.I Rias;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung;42 km;3100 Hektar;F;S;SYC	Kab, Bangka Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	468.139.000,00	468.135.000,00	100,00	42 Km	100	APBN TH. 2020
			8. Rincian Kegiatan : Pelaporan OP DI Rias berbasis SMOPI;Kab. Bangka Selatan;Kepulauan Bangka Belitung;1 Laporan;1 Laporan;NF;AU;SYC	Kab, Bangka Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43.480.000,00	43.157.000,00	99,26	1 Laporan	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Layanan Dukungan Manajemen Satker								
			1. Rincian Kegiatan : Administrasi Kegiatan;Kota Pangkal Pinang;Kepulauan Bangka Belitung;12 Bulan;12 Bulan;NF;AU;SYC	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	207.815.000,00	203.419.000,00	97,88	12 Bulan	100	APBN TH. 2020
			2. Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring);Kota Pangkal Pinang;Kepulauan Bangka Belitung;12 Bulan;12 Bulan;NF;AU;SYC	Kota Pangkalpinang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.250.000,00	10.678.000,00	94,92	13 Bulan	100	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	814.774.000,00	802.485.800,00	98,49	Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil	97,31	APBN TH. 2020
		2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	1. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	175.234.000,00	174.449.800,00	99,55	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	99,29	APBN TH. 2020
		3. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020	1. Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								
		4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Pelimpahan dalam Rangka Tugas Pembantuan terhadap lingkup urusan	1. Rincian Kegiatan : Penyusunan Rencana Program; dan Penyusunan Rencana Anggaran	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106.746.000,00	106.300.000,00	99,58	1 Layanan	98,91	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemerintah Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi									
			2. Rincian Kegiatan : Pengelolaan Keuangan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68.488.000,00	68.149.800,00	99,51	1 Layanan	99,67	APBN TH. 2020
			2. Kegiatan : Pengembangan Usaha Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	366.660.000,00	366.428.000,00	99,94	Terwujudnya suatu Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya	99,58	APBN TH. 2020
			1. Output : Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya								

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	304.160.000,00	303.994.000,00	99,95	12,00 OH dan 26 Unit	99,26	APBN TH. 2020
			2. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Pasca Panen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62.500.000,00	62.434.000,00	99,89	2,00 Pkt	99,89	APBN TH. 2020
			3. Kegiatan : Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	129.870.000,00	119.703.000,00	92,17	Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya	91,68	APBN TH. 2020
			1. Output : Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya								
			1. Rincian Kegiatan : Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106.270.000,00	97.423.000,00	91,67	1 Kawasan	91,49	APBN TH. 2020

No	Kementerian /Lembaga	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Rp (7)	Rp (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Rincian Kegiatan : Kelembagaan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi yang berfungsi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23.600.000,00	22.280.000,00	94,41	1 Kawasan	91,86	APBN TH. 2020
			4. Kegiatan : Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	143.010.000,00	141.905.000,00	99,23	Terfasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran	98,69	APBN TH. 2020
			1. Output : Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran								
			1. Rincian Kegiatan : Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	143.010.000,00	141.905.000,00	99,23	12 Bidang	98,69	APBN TH. 2020

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 melaksanakan pelimpahan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk Penugasan Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.645.890.000 dengan realisasi Rp 645.462.500 atau 17,70 %.

3.2.1 Target Kinerja

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
1	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Presentase Peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Rp. 581.000.000,00

3.2.2 Realisasi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No.	Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja informal maupun formal	Rp. 571.600.000,00

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

No	Bidang/Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Ekonomi (Tenaga Kerja)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2020	1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	581.000.000,00	571.600.000,00	98,38	Meningkatnya penempatan tenaga kerja informal maupun formal	100	APBN TH. 2020
			1. Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	581.000.000,00	571.600.000,00	98,38	Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja yang diberdayakan melalui sistem padat karya dan Wirausaha Baru	100	APBN TH. 2020
			1. Output : Tenaga kerja yang diberdayakan melalui sistem padat karya								

No	Bidang/Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			1. Rincian Kegiatan : Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui padat karya	Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	101.000.000,00	98.000.000,00	97,03	2 Paket (20 orang)	100	APBN TH. 2020
			2. Output : Wirausaha Baru								
			1. Rincian Kegiatan : Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui padat karya	Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	480.000.000,00	473.600.000,00	98,67	4 Paket (80 orang)	100	APBN TH. 2020
10.	Ekonomi (Tenaga Kerja)		Program :	Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	3.000.000.000,00	-	-	-	-	Pelaksanaan pembangunan /revitalisasi pasar Belinyu mengalami penundaan dalam pembangunannya yang didasari dengan Surat Bupati Bangka Nomor 510/4130/DINAKERPERINDAG/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan /Revitalisasi Pasar Belinyu Kabupaten Bangka. Yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam

No	Bidang/Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.
			Kegiatan :	Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
			Output :								

3.3 Permasalahan dan Kendala

- Dinas Pertanian
 1. Juknis yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan.
 2. SDM Kelompok masih sangat terbatas (tingkat pendidikan petani yang masih rendah), khususnya pada kegiatan administrasi dan keuangan maka hal ini sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dinas PU
 1. Faktor Alam yaitu kondisi cuaca mengakibatkan perubahan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 2. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 1. Kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi karena kurangnya fasilitas/sarana kendaraan operasional dilapangan.
 2. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- Disnaker Kab/Kota
 1. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan'
 2. Terdapat beberapa kegiatan yang harus menghadirkan pemateri/instruktur dari pusat, sehingga perlu penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal pemateri/instruktur pusat
 3. Pelaksanaan pembangunan /revitalisasi pasar Belinyu mengalami penundaan dalam pembangunannya yang didasari dengan Surat Bupati Bangka Nomor 510/4130/DINAKERPERINDAG/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan /Revitalisasi Pasar Belinyu Kabupaten Bangka. Yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Proses Pelaksanaan Pembangunan /Revitalisasi Pasar Belinyu Kabupaten Bangka belum dapat dilaksanakan tahun 2020 dikarenakan :
 - a) Pekerjaan konstruksi pasar belinyu dengan anggaran Rp. 3.000.000.000,00 ini klasifikasi bangunan gedung Negara tidak sederhana memerlukan waktu minimal 3 bulan (90 hari). Kalau dihitung waktu pelaksanaan dikurangi proses pembongkaran bangunan lama, relokasi pedagang hanya 26 hari.
 - b) Proses tender hanya 26 hari

c) Faktor cuaca saat ini musim hujan resiko pekerjaan tidak selesai dan jeleknya hasil kualitas pekerjaan

Adapun untuk pemenuhan persyaratan administrasi telah dilakukan, yaitu 16 dokumen yang diminta telah dipenuhi seperti RAB/Gambar, Soiltest dan status lahan CNC.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- Dinas Pertanian
 1. Melaksanakan rapat sosialisasi, koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
 2. Melakukan pelatihan teknis yang diikuti oleh petugas teknis dan Kelompok Tani pelaksana Kegiatan.
- Dinas PU
 1. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan.
 2. Mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stock persediaan peralatan dan material sesuai dengan kebutuhan proyek.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 1. Melakukan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan operasional lapangan.
 2. Memperkuat koordinasi dan konsultasi kepada instansi/pihak Unit Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- Disnaker Kab/Kota
 1. Perlu koordinasi yang semakin baik, saling mengisi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
 2. Perlu peningkatan SDM aparat Pembina sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator khususnya aparat Pembina Kabupaten/Kota.
 3. Pelaksanaan Pembangunan /Revitalisasi Pasar Belinyu Kabupaten Bangka mengalami penundaan dalam pembangunannya, maka dengan ini diberikan penambahan waktu untuk pelaksanaannya pada tahun 2021 (tahun jamak) serta pengalokasian dana Tugas Pembantuan tahun 2020 ke dana Tugas Pembantuan tahun 2021, sehingga dalam proses pembangunannya nanti dapat terealisasi dengan baik.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	70.306 orang	100%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	3.844 orang	100%

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	57.427 orang	81,68 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	2.239 orang	58,25%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2020:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	122.186.766.892	139.473.315.401	
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	7.252.306.180	4.531.414.428	

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	5.013 orang
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	235 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan pada tahun 2020 antara lain:

- a. Pada saat sosialisasi/pengumpulan data peserta dari desa dan kecamatan ada yang tidak hadir.
- b. Sebanyak 18,32 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah dan 41,75 persen anak usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus ada yang tidak bersekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan hal-hal berikut, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pencapaian SPM Bidang Pendidikan;
- b. Mengusulkan anggaran untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun bagi yang berkebutuhan khusus dengan cara pembangunan Unit Sekolah Baru, pembangunan ruang kelas, gratis biaya sekolah terutama bagi yang miskin.

4.2 Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.930 orang	100 %
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	330 orang	100 %

4.2.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.930 orang	100 %
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	330 orang	100 %

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan pada Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	95.195.450	-
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	54.900.000	32.552.450	-

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	44 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	34 orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

- a. Belum adanya SDM yang fokus menangani SPM;
- b. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai;
- c. Pencapaian SPM Provinsi bukan prioritas Kabupaten/Kota, yang memiliki target pencapaian yang berbeda;

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pembentukan unit yang menangani pelaksanaan krisis kesehatan dan KLB, bukan sebatas pengelola/pelaksana yang dapat di sinergikan dengan PSC 119;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
- c. Advokasi pimpinan terhadap kabupaten/Kota.

a. Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	n.a	n.a
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	n.a	n.a

	Domestik regional lintas kabupaten/kota.	limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		
--	--	--	--	--

4.3.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realiasi	Persentase
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	n.a	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	n.a	100%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	-	-	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	-	-	-

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	-

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu bahwa belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga untuk pencapaian target ini sulit direalisasikan.

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai solusi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ini akan berkonsultasi ke kementerian teknis yang membidangi urusan tersebut dan juga pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Bangka Belitung akan membuat Kegiatan Pengumpulan data agregasi Kab/Kota pengolahan data SPM bidang air minum dan air limbah.

b. Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	730 orang	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

4.4.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	730 orang	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-

4.4.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	8.000.000.000	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5 orang
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini khususnya untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program pemerintah daerah provinsi adalah belum adanya program pemerintah provinsi untuk kegiatan ini serta adanya rasionalisasi anggaran. Tahun 2021 direncanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi rumah layak huni yang terkena program pemerintah dan rumah tidak layak huni daerah yang potensi rawan bencana.

c. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	-	-

4.5.3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	-	-

4.5.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	-	-	

4.5.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Satpol PP PNS = 75 orang Satpol PP Non PNS = 151 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Satpol PP diminta menyiapkan anggaran untuk pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan kepada warga Negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung belum mendapatkan contoh konkret atas penerapan SPM ini dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara. Jika Satpol PP harus menyiapkan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan, apakah kode rekening belanja tersedia dan bagaimana standar belanjanya?
- b. Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki program dan kegiatan dalam menunjang penerapan SPM ini yaitu kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.192.960.700,00 dan kegiatan Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.659.940,00. Namun, saat ini belum dapat memfasilitasi penyiapan anggaran pelayanan kerugian dan pelayanan pengobatan kepada warga Negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan perda dan perkara dikarenakan berbagai masalah diatas.
- c. Berdasarkan Permendagri diatas dan memperhatikan masalah-masalah diatas, maka solusi saat ini yang dilakukan adalah menindak pelanggar perda dan perkara yang benar-benar diyakini kebenarannya, dan menghindari bentrok fisik dengan tujuan mengurangi resiko tuntutan masyarakat atas pelayanan kerugian materil dan pengobatan.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan di atas Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah mengkomunikasikan hal ini, dengan menyampaikan surat sebanyak 2 (dua) kali kepada Kepala Bakuda Provinsi Kep Bangka Belitung. Bakuda Provinsi Kep. Bangka Belitung merespon surat Satpol PP, dalam suratnya Kepala Bakuda meminta Satpol PP memetakan terlebih dahulu, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi SIPD. Kedepan Satpol PP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian terkait agar perencanaan dan penganggaran SPM dapat dilaksanakana dengan baik.

d. Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	20 org	100 %

2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	24 org	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	6 org	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	a. Bencana alam 8 orang / 2 KK b. Bencana sosial 10 orang	100 %

4.6.3 Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	18 org	90,00 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	27 org	112,50 %

3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	6 org	100,00 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	a. Bencana Alam 8 orang/ 2 KK b. Bencana sosial 10 orang	100 % 100 %

4.6.4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti		1.443.055.500	
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti		1.019.440.800	
3.	Rehabilitasi Sosial dasar	Jumlah Warga Negara lanjut usia			

	Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.		868.744.000	

4.6.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2020, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	27 orang
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	32 orang
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	

4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	499 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

- a. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial adalah jumlah penerima manfaat belum mencapai kuota maksimal karena ketiadaan klien.
- b. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial adalah petunjuk operasional dari Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) adalah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di Dalam UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, bahwa Jenis Pelayanan Dasar didalam PSBS meliputi rehabilitasi sosial dasar anak terlantar, rehabilitasi sosial ABH dan rehabilitasi sosial dasar orang terlantar.
- c. Permasalahan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial adalah Belum adanya pelayanan di panti sosial yang membidang gelandangan dan pengemis.
- d. Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi adalah tidak tersedianya anggaran penyediaan permakanan dapur umum lapangan untuk korban bencana. Selain itu ada beberapa korban bencana yang tidak termasuk dalam kriteria penerima yaitu terkena dampak tetapi tidak termasuk kategori ringan, sedang ataupun berat, masuk dalam wilayah lokasi bencana namun tidak terdampak bencana, terdampak bencana kondisi rusak ringan dan mampu secara ekonomi dan material serta korban yang terdampak bencana baik berat, sedang maupun ringan namun mampu dan tidak mau menerima bantuan dan merasa tidak layak untuk dibantu.

e. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas;
2. Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan;
3. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
4. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka;
5. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat;
6. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan;
7. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA;
2. Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA;
3. Pengembangan Kurikulum SMA;
4. Pemberian Beasiswa Siswa SMA;
5. Pengembangan Sarana Pendidikan SMA;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK;
7. Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK;
8. Pengembangan Kurikulum SMK;
9. Pemberian Beasiswa SMK;
10. Pengembangan Sarana Pendidikan SMK;
11. Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Menengah (DAK Non Fisik) 82 Sekolah;
12. Pengelolaan Dana Bos Afirmasi;
13. Pengelolaan Dana Bos Kinerja;
14. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka (26 Sekolah);
15. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat (11 Sekolah);
16. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan (27 Sekolah);
17. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur (20 Sekolah);
18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus;

19. Peningkatan Kualitas Kesiswaan Pendidikan Khusus;
20. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus;
21. Peningkatan Fungsi Pelayanan PLA;
22. Pengembangan Sarana Pendidikan Khusus;
23. Pengelolaan Dana BOS Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik);
24. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka (2 Sekolah);
25. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat (1 Sekolah);
26. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Dan Bangka Selatan (2 Sekolah);
27. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur (2 Sekolah).

4.7.2 Urusan Kesehatan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Mobilisasi Satuan Tugas Krisis Kesehatan dan KLB;
2. Bimtek Pelaksanaan SPM;
3. Koordinasi Penanggulangan Krisis Situasi Covid -19;
4. Mobilisasi Satuan Tugas Penyidikan Epidemiologi KLB.

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan SPM pada urusan pekerjaan umum. Hal ini karena belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam Program Pembangunan Perumahan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah Peningkatan Kualitas Rumah Yang Layak Huni di Provinsi.

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penindakan yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada.

4.7.6 Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program:

1. Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial;
2. Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial;
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Klien
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti;
3. Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;
4. Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti;
5. Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS;
7. Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial;
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana ALam
9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
10. Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam
11. Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 memuat capaian kinerja yang terdiri dari profil daerah, perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

1. Profil Daerah.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mencapai 1.517.590 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93 dan rasio jenis kelamin 108,49. Rasio jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 108,49 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

- Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian;
- Masih rendahnya nilai tambah sektor perikanan;
- Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi;
- Masih rendahnya nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian;
- Masih rendahnya nilai tambah sektor Industri Pengolahan dan perdagangan;
- Masih rendahnya nilai tambah sektor ketenagalistrikan;
- Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- Masih adanya masyarakat yang menganggur;
- Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;
- Masih rendahnya pendapatan masyarakat desa;

- Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur Pekerjaan umum;
- Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar;
- Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan;
- Masih rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat;
- Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;
- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
- Masih rendahnya kesejahteraan anak;
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan;
- Masih rendahnya kualitas pemuda.

3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yaitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 71,30 poin pada Tahun 2019 menjadi 71,47 poin pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin, Angka Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 4,5 pada tahun 2020 sebesar 4,89 mengalami kenaikan sebesar 8,66, Angka Pengangguran tahun 2019 sebesar 3,58 tahun 2020 sebesar 5,25 adanya kenaikan sebesar 46,64, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 sebesar 3,32 dan tahun 2020 -2,3 adanya penurunan sebesar -169,27, Pendapatan Perkapita (adhk) tahun 2019 sebesar 50.911.426 dan tahun 2020 49.772.286 adanya penurunan sebesar -2,24, dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2019 sebesar 0,262 dan tahun 2020 0,257 adanya penurunan sebesar -1,91.

4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan dasar juga terus ditingkatkan pada tahun 2020. pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. indikator kinerja kunci hasil bidang pendidikan yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah sebesar 81,68%, tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus sebesar 58,25%, bidang kesehatan rasio daya tampung rumah sakit rujukan sebesar 0,15%, persentase rs rujukan provinsi yang terakreditasi sebesar 100%, persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sebesar 100%, persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi klb provinsi sebesar 100%, bidang pekerjaan umum rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir sebesar 4,03%, rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai

rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di ws kewenangan provinsi sebesar 15,30%, rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 10,28%, rasio kemantapan jalan sebesar 91,54%, rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 63,72%, bidang perumahan rakyat hanya melaksanakan kegiatan bantuan rumah layak huni, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100%, persentase perda dan perkada yang ditegakkan sebesar 100%, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal sebesar 50%, persentase penanganan pra bencana sebesar 42,86%, persentase penanganan tanggap darurat bencana sebesar 100%, bidang sosial persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti sebesar 90%, persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti sebesar 112,50%, persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti sebesar 100%, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi sebesar 35,83%.

Adapun untuk investasi PMA-PMDN provinsi secara nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dalam berinvestasi dengan nilai investasi sebesar 4246,07 tahun 2019 2.561.150.700.000 pada tahun 2020 4.246.093.000.000 sebesar 39,68%. Berbagai upaya dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif akan terus ditingkatkan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi termaju dan menjadi daerah yang atraktif dalam menarik investasi dalam maupun luar negeri

5. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,22	7,78	Naik 3,56
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	8,11	9,76	Naik 1,65
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	438.373	193.758	Turun 244.615

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		domestik			
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,13	0,02	Turun 0,11
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,87	-9,23	Turun 8,36
5	Meningkatnya Produksi sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1,17	-5,64	Turun 4,47
6	Meningkatnya kemandirian Fiskal	Rasio Pendapatan asli Daerah (PAD) terhadap APBD	0,27	0,27	TETAP
7	Menurunnya Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	3,62	5,25	Naik 1,63
8	Menurunnya kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,50	4,50	TETAP
9	Menurunnya Inflasi	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,62	1,08	Naik 1,54
10	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	1,98	1,70	Naik 0,28
11	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Ketersediaan Transportasi layak jalan	0,10	0,10*	TETAP
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah terkoneksi	11,43	11,43*	TETAP

No	Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Keterangan Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,84	0,60*	TETAP
12	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,87	12,05	Naik 0,18
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,98	8,06	Naik 0,08
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,50	70,64	Naik 0,14
		Angka kematian ibu	137,34	26	Naik 111,34
		Angka Kematian Bayi	7.16	7,15	Naik 0,01
		Angka Stunting	7,70	9,7	Turun 2
14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	TETAP
		Indeks RB	65,39	66,84	Naik 1,45
15	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	84,12	84,12	TETAP
16	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	75.48	75.48	TETAP
17	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	71.71	71.71	TETAP
18	Meningkatnya kapasitas Terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,24	0,40	Naik 0,16
19	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,80	65,80	TETAP

6. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatnya kemandapan jalan nasional;
- Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
- Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil;
- Meningkatnya konektivitas jalan nasional dan Meningkatnya kemandapan jalan nasional;
- Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, kinerja layanan irigasi, dan Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA;
- Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil;
- Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian seluas 1.000 Ha;
- Terlaksananya irigasi perpompaan sebanyak 11 unit;
- Terlaksananya irigasi perpipaan sebanyak 2 unit;
- Terlaksananya optimasi lahan seluas 2.500 Ha;
- Terlaksananya perluasan dan perlindungan lahan pertanian 4 provinsi;
- Terlaksananya e-RDCK penerapan kartu tani sebanyak 7 database;
- Terlaksananya kawasan ubi kayu 1.400 Ha;
- Terlaksananya kawasan Padi 1.330 Ha;
- Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat seluas 3.567 Ha;
- Terlaksananya Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat seluas 1.200 Ha;
- Terlaksananya Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 2 unit;
- Terlaksananya lokasi pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 2 lokasi;
- Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan seluas 150 Ha;
- Terlaksananya kawasan lada, pala dan cengkeh seluas 1.425 Ha;
- Tersedianya sarana dan prasarana pasca panen komoditas perkebunan sebanyak 5 Unit;
- Terlaksananya kebun sumber benih tanaman komoditi perkebunan seluas 27 Ha;
- Terlaksananya rekomendasi benih tanaman perkebunan sebanyak 3 rekomendasi;
- Terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan sebanyak 1.520.000 batang;
- Terlaksananya kawasan bawang merah seluas 20 Ha;
- Terlaksananya kawasan aneka cabai seluas 200 Ha;

- Terlaksananya kawasan durian seluas 100 Ha;
- Tersedianya sarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 3 unit;
- Tersedianya prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya kegiatan hijau pakan ternak seluas 15 Ha;
- Terlaksananya Mutu dan keamanan pakan 67 sampel;
- Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan 1.500 Dosis;
- Terlaksananya optimalisasi reproduksi sebanyak 1.944 Acceptor;
- Terlaksananya pengembangan unggas dan aneka ternak sebanyak 1.500 ekor;
- Terlaksananya pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH sebanyak 3 unit usaha;
- Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk sebanyak 125 sampel;
- Terlaksananya pengendalian pemotongan betina produktif di 1 lokasi;
- Tersedianya sarana pengolahan pangan dan non pangan sebanyak 1 unit;
- Terlaksananya Kelembagaan dan Usaha Peternakan sebanyak 2 lokasi;

7. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian standar pelayanan minimal dari 6 (enam) pelayanan dasar yang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	57.427 orang	81,68 %
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	2.239 orang	58,25%

b. Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bencana dan/atau	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau bencana berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.930 orang	100 %

	berpotensi bencana provinsi			
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	330 orang	100 %

c. Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realiasi	Persentase
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	n.a	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	n.a	100%

d. Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	730 orang	100 %
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara di Provinsi	-	-

f. Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	18 org	90,00 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	27 org	112,50 %
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	6 org	100,00 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	a. Bencana Alam 8 orang/ 2 KK b. Bencana sosial 10 orang	100 % 100 %

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diraihnya predikat WTP atas LKPD tahun 2020.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan harapan semoga kinerja penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat.